

SEJARAH KOMANDEMEN SUMATERA DI PROVINSI SUMATERA BARAT (1945-1949)¹

Undri

BPNB PADANG

Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuranji Padang

Abstrak

Tulisan ini ingin menjelaskan tentang sejarah komandemen Sumatera di Propinsi Sumatera Barat, mulai dari latarbelakang berdirinya, proses terbentuknya, perkembangan dan tentang akhir dari komandemen Sumatera tersebut. Pembentukan Komandemen Sumatera bisa dirunut dari kondisi bangsa Indonesia setelah merdeka. Setelah Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) sebagai bagian dari Badan Pertolongan Korban Perang. BKR bukan badan militer dan semata-mata semacam Hansip Wanra saja saat itu. Pada tanggal 5 Oktober 1945, B.K.R ini dengan maklumat Pemerintah no.6, telah ditransformasikan menjadi T.K.R (Tentara Keamanan Rakyat). Isi maklumat untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 6 Oktober 1945 keluar maklumat tambahan yaitu, sebagai menteri keamanan rakyat diangkat Soeprijadi. Komandemen Sumatera pindah ke Bukittinggi beberapa hari sebelum agresi Belanda pertama. Pada waktu ini yang seharusnya komandemen yang membentuk kesatuan-kesatuan, tetapi sekarang terbalik. Devisi lebih dahulu lahir dari komandemen. Laskar-laskar lebih dahulu lahir dari komando-komando. Pada waktu agresi militer Belanda II ini markas komandemen Sumatera di Bukittinggi pernah di bom oleh Belanda ketika para anggota Komandemen Sumatera sedang rapat. Seiring dengan kondisi ini pada tanggal 21 Desember 1947 Bukittinggi dibumihanguskan. Dengan kondisi inipun basi komandemen Sumatera di pindahkan ke Rao. Komandemen memilih Rao sebagai basis mengingat letak geografisnya dan mudah berhubungan dengan Tapanuli. Dari Rao ada jalan yang menuju ke Rokan, Pasir Pangarayan dan Bagansiapiapi langsung ke Selat Malaya dan Singapura.

Kata Kunci : Komandemen Sumatera, dan Sumatera Barat.

A. PENDAHULUAN

Pembentukan Komandemen Sumatera bisa dirunut dari kondisi bangsa Indonesia setelah merdeka. Setelah Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) sebagai bagian dari Badan Pertolongan Korban Perang. BKR bukan badan militer dan semata-mata semacam Hansip Wanra saja saat itu. Pada tanggal 5 Oktober 1945, B.K.R ini dengan maklumat Pemerintah no.6, telah ditransformasikan menjadi T.K.R (Tentara Keamanan Rakyat). Isi maklumat untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 6

¹ Bahan ini berasal dari Laporan Penelitian Undri dan Nurmatias, *Sejarah Komandemen Sumatera Di Provinsi Sumatera Barat (1945-1949)*. Laporan Penelitian. Padang : Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2012.

Oktober 1945 keluar maklumat tambahan yaitu, sebagai menteri keamanan rakyat diangkat Soeprijadi. (Audrey Kahin, 2006 :92-92.)

Pada awalnya Komandamen Sumatera berpusat di Prapat –Sumatera Utara. Markas Komandemen Sumatera ditempatkan di sebuah villa besar, bertingkat, berkas peristirahatan Gubernur Belanda di zaman Hindia Belanda. Di daerah ini komandemen tidak dapat berfungsi penuh. Tempatnya terlalu terisolasi dan markas ini tidak mempunyai perangkat perhubungan yang dapat menghubungkan markas ini dengan kesatuan-kesatuan di seluruh Sumatera. Mayor Sudarsono komandan seksi Perhubungan yang ditugaskan untuk membangun perhubungan komandemen ternyata mempunyai banyak kesulitan untuk mendapatkan alat perhubungan. Sebagian pejabat seperti Kolonel M. Nuch yang memimpin komandemen di Sumatera Selatan tidak pernah datang ke Prapat. Semua ini, membuat komandemen tidak berfungsi. Akhirnya seksi Intelijen Komandemen dipindahkan ke Pematang Siantar tepatnya di Marihat, khususnya bagian yang harus menghadapi tugas Sumatera Timur.(Chairul Basri, 2003 : 130.

Dengan terbentuknya kantor di Marihat, yang akan memantau front Sumatera Timur, Tapanuli dan Aceh maka kantor intelijen sekarang ini mempunyai dua kantor. Kantor yang lain ada di Bukittinggi, yang memantau kejadian-kejadian di front Padang dan sekitarnya, serta seluruh Sumatera Tengah meliputi Sumatera Selatan.

Komandemen Sumatera pindah ke Bukittinggi beberapa hari sebelum agresi Belanda pertama. Pada waktu ini yang seharusnya komandemen yang membentuk kesatuan-kesatuan, tetapi sekarang terbalik. Devisi lebih dahulu lahir dari komandemen. Laskar-laskar lebih dahulu lahir dari komando-komando.

Di Sumatera Barat proses menentarkan laskar ini berjalan lancar. Sumatera Barat penduduknya homogen. Tidak ada pertentangan suku dan kerja sama antara pihak tentara dan pemuka-pemuka masyarakat semenjak semula berjalan lancar. Kerjasama antara tentara dan pemuka-pemuka agama misalnya telah menyebabkan laskar-laskar seperti Hisbullah dan Sabilillah dapat dijadikan batalyon-batalyon yang akhirnya menjadi bagian resimen Bukittinggi. Sebab itu Sumatera Barat dalam revolusi dapat memusatkan perhatiannya kepada musuh yaitu Belanda.

Di Sumatera Timur pertentangan antara suku dengan suku sangat tajam. Mereka hanya mengenal penyelesaian masalah melalui kekerasan. Perpecahan dalam partai politik sangat mempengaruhi penyatuan laskar-laskar. Sebenarnya Komandemen Sumatera merupakan wahana yang terbaik untuk menyatukan laskar-laskar. Tetapi ini tidak dapat terwujud, dan mengakibatkan terjadinya tragedi yang menyedihkan. Semua ini membuka kesempatan bagi Belanda untuk mempercepat lahirnya negara Sumatera Timur.

Ternyata argresi Belanda pertama itu tidak berjalan lama. Pada tanggal 2 Agustus Dewan 1947 Dewan Keamanan PBB telah memutuskan agar diadakan *cease fire* dalam persengketaan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 4 Agustus 1947 Presiden Sukarno bersama dengan pihak Belanda, memerintahkan penghentian tembak-menembak dan tetap tinggal di tempat masing-masing (Chairul Basri, 2003 : 148).

Kemudian ketika Hatta diangkat menjadi perdana menteri pada Januari 1948, dia juga menjabat sebagai menteri pertahanan dihadapkan kepada semakin mengecilnya wilayah kekuasaan republik, terutama di Jawa. Dia membuat rencana bersama kolonel A.H. Nasution, Panglima Devisi Siliwangi dari Jawa Barat untuk merampingkan angkatan bersenjata Republik. (Audrey Kahin, *Ibid*, 2006 : 56). Dengan demobilisasi besar-besaran mereka bermaksud menjadikan struktur angkatan bersenjata sangat efisien dan sejalan dengan itu mengurangi beban keuangan negara. (Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1928-1998*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005 : 196.)

Rencana tersebut tidak hanya dilakukan terhadap angkatan bersenjata yang ada di Jawa tetapi juga di Sumatera, di mana Nasution mempertimbangkan untuk membentuk empat daerah militer, -masing-masing daerah merupakan infrastruktur yang mandiri sehingga dengan demikian mampu membangun pertahanan dengan kekuatannya sendiri. Khusus masing-masing divisi yang ada di Sumatera akan diciutkan menjadi satu brigade mobil. Untuk Sumatera Barat hal itu hanya seperti jumlah pasukan Devisi Banteng, yang akan dipertahankan sebagai tentara reguler sementara sisanya akan dialihkan menjadi pasukan keamanan setempat.

Dalam perjalanannya bersama Hatta ke Bukittinggi pada bulan April 1948, Nasution menyampaikan langkah-langkah rasionalisasi itu kepada para perwira Komando Sumatera, yang semuanya menolak tegas rencana tersebut. Perwira-perwira Sumatera mengemukakan bahwa reorganisasi itu mungkin baik untuk diterapkan di Jawa, tetapi tidak cocok sama sekali untuk Sumatera, Belanda hanya menguasai sekitar seperlima wilayah pulau ini sementara Jawa setengahnya. Angkatan bersenjata di Sumatera tidak menjadi beban keuangan Republik karena kebutuhan makanan prajurit dipasok oleh rakyat setempat, dan senjata mereka diproduksi secara lokal atau dibeli dengan dana hasil perdagangan dengan Singapura dan Malaysia. Kesatuan atau brigade mobil seperti itu tidak sesuai dengan tipe perjuangan rakyat yang sedang marak di Sumatera, sementara demobilisasi besar-besaran hanya akan membawa dampak psikologis yang buruk terhadap para tentara yang telah berjuang secara sukarela melawan Belanda demi membela Republik. (Ahmad Husein dan kawan-kawan, 1991 : 705). Pertentangan terbuka oleh perwira Komando Sumatera terhadap rencana rasionalisasi itu membuat marah Hatta dan Nasution. (Audrey Kahin, 2005 : 199)

Komandemen Sumatera sekarang dibawah pimpinan kolonel Hidayat. Sebutannya Panglima Tentara Teritorium Sumatera (PTTS). Pada waktu kolonel Hidayat memimpin Komandemen Sumatera, Devisi Banteng sedang menghadapi peralihan. Kepergian Ismail Lengah-pemimpin Devisi Banteng ke Jawa waktu itu menimbulkan luka yang dalam diantara para perwira Devisi Banteng. Waktu itu Kolonel Hidayat masih memerlukan waktu untuk dapat menyesuaikan sikap dan tindakannya dengan situasi di Sumatera Barat.

Adanya jurang antara pimpinan dan yang dipimpin tidak memudahkan tugasnya. Tindakan yang pertama ialah memecah daerah Devisi Banteng atau sub-teritorial Sumatera Tengah menjadi sub-teritorium Sumatera Barat dan Sub-teritorial Riau. Devisi Banteng, setelah Kolonel Ismail Lengah dicopot sudah seperti ayam kehilangan induk. Ditambah satu pukulan psikologis yaitu terbaginya Sumatera Tengah menjadi sub-teritorial tersebut. Kejadian-kejadian

ini menggoyahkan kepemimpinan Devisi Banteng, justru pada saat Republik menghadapi argesi militer Belanda II.

Pada waktu agresi militer Belanda II ini markas komandemen Sumatera di Bukittinggi pernah di bom oleh Belanda ketika para anggota Komandemen Sumatera sedang rapat. Seiring dengan kondisi ini pada tanggal 21 Desember 1947 Bukittinggi dibumihanguskan. Dengan kondisi inipun basi komandemen Sumatera di pindahkan ke Rao. Komandemen memilih Rao sebagai basis mengingat letak geografisnya dan mudah berhubungan dengan Tapanuli. Dari Rao ada jalan yang menuju ke Rokan, Pasir Pangarayan dan Bagansiapiapi langsung ke Selat Malaya dan Singapura. Selain menentukan basis perjuangan komandemen Sumatera juga dibentuk staf komandemen Sumatera. Letnan Kolonel A. Tahir ditetapkan sebagai kepala staf, Mayor Chairul Basri Staf Umum I (intelijen), Mayor Kartakesuma sebagai Staf Umum II (Operasi), Mayor Tjakradipura sebagai staf III (Personil) dan Kapten D.I Pandjaitan sebagai Staf Umum IV (Logistik). Tugas mereka selain membantu Panglima juga menyediakan logistik untuk front.

Rao merupakan benteng Komandemen Sumatera terakhir. Komandemen Sumatera berangsur-angsur mulai di demobilisasi. Perwira-perwiranya ditempatkan oleh Panglima ke berbagai daerah. Letnan Kolonel Ahmad Tahir ditarik ke Jakarta. Mayor Tjakradipura di tarik ke Jakarta. Kapten Panjaitan dan Mayor M.M.R Kartakesuma ditempatkan di Medan. Dengan demikian selesailah tugas komandemen di daerah Rao. Sebagian dari tugasnya dibebankan kepada Markas Besar Angkatan Darat Jakarta.

Berdasarkan fakta di atas, maka sepatutnya ditulis sejarah Komandemen Sumatera. Sejarah tersebut sejogyanya ditulis, untuk dipahami, dipelajari, serta dapat terpublikasikan dan diketahui oleh generasi muda atau penerus. Begitu juga dengan kenyataan bahwa sampai saat sekarang ini untuk kearah penulisan sejarah perjuangan tersebut khususnya dalam mempertahankan kemerdekaan masih kurang. Untuk itulah perlu terobosan untuk memunculkan kepermukaan, sehingga diketahui oleh masyarakat banyak. Serta dapat dijadikan sebagai bahan untuk kebijakan di Propinsi Sumatera Barat. Khususnya bagi sejarawan sendiri, tentu kondisi tersebut masih merupakan lahan yang luas untuk dikaji, khususnya kajian sejarah. Atas dasar pemikiran diatas maka penelitian ini dilakukan.

Rangkaian pertanyaan berikut ini dapat membantu mengarahkan pokok-pokok persoalan secara lebih jelas. Adapun pertanyaan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya komandemen Sumatera di Propinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimanakah proses terbentuknya komandemen Sumatera di Propinsi Sumatera Barat ?
3. Bagaimanakah perkembangan komandemen Sumatera di Propinsi Sumatera Barat ?
4. Bagaimanakah akhir dari komandemen Sumatera di Propinsi Sumatera Barat?

Adapun batasan spasial dalam pembahasan ini adalah Propinsi Sumatera Barat, terutama

daerah-daerah yang terlibat langsung dalam perkembangan komandemen Sumatera tersebut seperti Kota Bukittinggi dan Kabupaten Pasaman.

Batasan temporal dalam pembahasan ini adalah dari tahun 1945 sampai 1949. Tahun 1945 diambil sebagai batasan awalnya karena pada tahun tersebut berdirinya komandemen Sumatera Sedangkan tahun 1949 diambil sebagai batasan akhirnya karena pada tahun tersebut komandemen Sumatera mulai dibubarkan sebagai sebuah kesatuan dan tugasnya diambilalih oleh Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta.

Sehubungan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan tentang latarbelakang berdirinya komandemen Sumatera di Propinsi Sumatera Barat.
2. Menjelaskan tentang proses terbentuknya komandemen Sumatera di Propinsi Sumatera Barat.
3. Menjelaskan tentang perkembangan komandemen Sumatera di Propinsi Sumatera Barat
4. Menjelaskan tentang akhir dari komandemen Sumatera di Propinsi Sumatera Barat.

Sebagai suatu kajian historis, secara akademik penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai informasi awal bagi usaha penelitian lebih lanjut tentang berbagai persoalan dari sejarah militer di Propinsi Sumatera Barat. Dengan kata lain, penelitian ini memberikan sumbangan bagi salah satu aspek militer dari penulisan sejarah Propinsi Sumatera Barat yang sampai sekarang ini belum banyak diketahui dan dikaji.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekonstruksi yang komprehensif pada persoalan komandemen Sumatera di Propinsi Sumatera Barat. Secara terapan, penelitian ini juga berpretensi untuk mengembangkan wawasan pengetahuan mengenai salah satu varian dari kehidupan sosial serta memahami lebih jauh tentang persoalan sejarah komandemen Sumatera di Propinsi Sumatera Barat. Pada gilirannya, penelitian ini kiranya memberikan manfaat bagi penentu kebijakan dalam hal pelestarian sejarah di Propinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini beranjak dari pemikiran Robert Guur yang menjelaskan bahwa revolusi itu merupakan tingkat dan skala paling akhir dari sebuah gerakan sosial. Seperti yang dikutip oleh Zayardam Zubir (dalam Zusneli Zubir dan kawan-kawan, 2008), mengelompokkan gerakan itu atas 3 (tiga) tingkatan :

Pertama, turmoil, yaitu tindakan kekerasan politis yang terorganisir dan partisipasi populer, termasuk serangan politis, kerusuhan, konflik politik, dan pemberontakan kedaerahan yang relatif spontan. Kedua, konspirasi, kekerasan politis yang terorganisir rapi dan partisipasi terbatas termasuk pembunuhan politis yang terorganisir, terorisme dalam skala kecil, kudeta dan pemberontakan. dan ketiga perang internal, kekerasan politis yang terorganisir rapi dan partisipasi populer dari luar bertujuan untuk mengembangkan rezim tertentu.

Dalam penelitian ini sebetulnya termasuk dalam kerangka revolusi yang telah dimungkinkan untuk mendirikan sebuah komandemen yakni Komandemen Sumatera. Dalam catatan sejarah

perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan atau revolusi berlangsung selama kurun waktu 1945-1949. Masa tersebut saat yang paling sulit dalam sejarah perjuangan berdirinya republik ini. Tetapi saat terberat dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia terasa pada kurun waktu 1945-1950. Pada agresi Belanda kedua hampir saja Negara Indonesia yang baru berdiri ini runtuh. Belanda menyerang Indonesia dan ibukota Yogyakarta diduduki sehingga kevakuman dalam pemerintahan. Pemimpin bangsa seperti Sukarno, Hatta dan lainnya ditawan oleh aggressor Belanda. Secara ilmu tatanegara kalau Negara dan pemimpinnya sudah tidak ada pemerintahan atau Negara tersebut lumpuh atau tidak ada. Pada saat itu daerah yang dominan dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan adalah masyarakat Jawa dan Sumatera, koordinasi dan informasi kedua pulau ini lumpuh sehingga tidak adalagi komunikasi yang intens. Tentara Republik Indonesia pada agresi kedua sudah tercerai-berai dan mengungsi dengan mempersiapkan strategi/taktik dihutan sehingga komando terputus antara divisi-divisi yang ada.

Persoalan mengenai Sumatera Barat telah banyak dikaji oleh berbagai peneliti. Namun kajian tentang Komandamen Sumatera di Propinsi Sumatera Barat sejauh yang diketahui belum ada yang meneliti. Dari beberapa sumber yang pernah menyinggung masalah Sumatera Barat pada umumnya seperti karya Chairul Basri (2003), menyebutkan tentang sejarah kehidupannya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Didalam karya tersebut dia menjelaskan bahwa Rao merupakan benteng terakhir dari Komandemen Sumatera tersebut.

Karya Audery Kahin (2006) tentang perjuangan kemerdekaan Sumatera Barat dalam revolusi nasional Indonesia 1945 sampai 1950. Sebuah karya yang menjelaskan tentang perjuangan rakyat Sumatera Barat alam melawan penjajahan Belanda.

Karya Audrey Kahin (2005), menjelaskan tentang sejarah masyarakat Sumatera Barat diawali dengan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda sampai kepada melakukan integrasi di bawah pemerintahan Orde Baru. Sebuah karya yang menyuguhkan tentang pengalaman masyarakat Sumatera Barat dengan pemberontakannya sampai ke integrasi. Karya tersebut memiliki temporal dari tahun 1926 sampai 1998.

Audrey Kahin (1978) dalam disertasinya “Sumatera Barat diwaktu revolusi”. Dalam disertasi ini diuraikan betapa akhirnya pemerintah Keresidenan Sumatera Barat harus mengalah dari desakan nagari yang radikal sehingga para pnghulu tersingkir dari jabatan resmi pemerintahan di nagari.

Mestika Zed (1997) yang dikenal dengan *Somewhere to the Jungle in Sumatra*. Sesuai dengan kondisi yang serba darurat dan terbatas kiprah Pemerintah Darurat Republik Indonesia menjalankan misi kenegaraan dengan mobil. Mobilisasi pergerakan ini dalam rangka mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dari kejaran Belanda. Pergerakan ini berlangsung selama 19 Desember 1948 – Juli 1949.

Menurut Mestika Zed, upaya Pemerintah Darurat Republik Indonesia ini tetap eksis maka dengan secepatnya pemimpin memindahkan pusat kekuasaan dari Bukittinggi bergerak dalam tiga kelompok. Kelompok pertama yang dipimpin Mr. St. Mohamad Rasyid dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Koto Tinggi, Gunung Omeh dan kemudian mereka

menetap di sana. Rombongan kedua dibawah pimpinan Sjafroeddin Prawiranegara dan Mr. T. Muhammad Hasan berangkat Halaban dekat lereng Gunung Sago dan sekarang masuk wilayah Kabupaten 50 Koto dan terus ke Bidar Alam. Kelompok ketiga dibawah pimpinan Kol Hidayat, Sulaiman Effendi dan Mr. Muhammad Nasrun. Kolonel Hidayat terus mengadakan perjalanan sampai ke Aceh. Kepala Polisi Sumatera Barat Sulaiman Effendi membuat pertahanan yang dikenal dengan front Palupuh. Sedangkan Mr. Muhammad Nasrun singgah dan menetap dikam halamannya di Lubuk Sikaping. Pemikiran ini diambil supaya tentara Belanda tidak dapat melumpuhkan pemerintahan Republik Indonesia. Dengan munculnya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, mata dunia masih menganggap pemerintahan Indonesia ada dan syah. Pemerintah dan tentara Belanda akan mencari Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ini agar tujuan dan maksud untuk menjajahan serta menguasai tercapai.

Karya Amin Imran dan kawan-kawan (2003), menjelaskan terutama tentang Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dalam teori tatanegara, Negara yang sudah tidak punya pemimpin dan ibukota negaranya dikuasai, berarti Negara tersebut sudah lumpuh/tidak ada legitimasi. Menurut pemikiran pemerintah agresi Belanda kedua Indonesia sudah tidak ada. Melihat kondisi yang ada maka atas inisiatif pemimpin di Yogyakarta menirinkan mandat pertama ke Mr. Sjafroeddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera. Dalam manajemen Resiko dalam melakukan sesuatu perlu jalan alternatif apabila rencana satu gagal maka dibuat rencana kedua yaitu mengirimkan mandat kepada pemimpin Republik Indonesia di luar negeri. Pemimpin Republik Indonesia yang sedang berada di luar negeri adalah Dr. Soedarsono, Mr Maramis dan Palar. Dalam kalangan ahli sejarah apakah surat mandate itu sudah diterima atau belum ini tidak masalah tetapi dalam situasi yang genting ini Mr Sjafroeddin Prawiranegara (menteri kemakmuran) yang berada di Bukittinggi mengambil tindakan tepat dalam menyelamatkan republik ini. Beliau dengan tanggap bersama pemimpin militer dan sipil di Sumatera membentuk Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1945.

Kemudian karya Jeffrey Hadler, Jeffrey membongkar fakta di balik kolonialisme dan nasionalisme dengan memfokuskan pada tema kultural: perubahan konseptualisasi rumah (house) dan keluarga (family); gagasan modernitas yang berhubungan dengan budaya Minangkabau sendiri, agama Islam, dan kebudayaan Eropa; serta persaingan antara kekuasaan dan pendidikan. Dia menggunakan banyak sumber lokal, antara lain Naskah Tuanku Imam Bonjol. Jeffrey menyatakan bahwa kini satu-satunya kelompok masyarakat matriarkat beragama Islam terbesar di dunia yang masih tersisa adalah etnis Minangkabau. Jeffrey menganalisis bagaimana sistem matriarkat Minangkabau mampu melakukan resistensi terhadap serangan dua ideologi asing pada abad ke-19 dan ke-20: Islam dan kolonialisme (Belanda). Ia membahas sejarah ringkas Perang Paderi (1803-1837), yaitu usaha panglima Paderi yang kontroversial Tuanku Imam Bonjol (TIB) menggantikan system matriarkat di Minangkabau dengan model masyarakat Islam yang ketat merujuk pada Al Quran dan hadis.

Kemudian, karya Jande A Drakard, *Kingdom of Words : Language and Power in Sumatra*. South-East Historical Monographs. Oxford University Press, 1999. Dalam buku tersebut Drakard

menjelaskan tentang keberadaan kerajaan Pagaruyung , raja-raja di bawah panji Kerajaan Pagaruyung baik raja di darek maupun rantau. Dia juga menjelaskan tentang bahasa yang digunakan oleh Raja Pagaruyung untuk menunjuk wakilnya di daerah, bahasa yang sangat kental sifat kekeluargaan.

B. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah terdiri dari atas empat tahap *pertama heuristic*, mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah atau pengumpulan sumber, *Kedua*, kritik menilai otentik atau tidaknya sesuatu sumber dan seberapa jauh kredibilitas sumber itu, *Ketiga*, sistesis dari fakta yang diperoleh melalui kritik sumber atau disebut juga kredibilitas sumber itu dan *Keempat*, penyajian hasilnya dalam bentuk tertulis. (Louis Gottschalk, 1985. hal. 32 ; lihat juga Kuntowijoyo, 1999. hal. 89.)

Tahap *pertama, heuristic*, yaitu tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah dalam penelitian ini dengan sasaran utamanya sumber-sumber primer, berupa arsip-arsip yang pernah menulis tentang Komandamen Sumatera di Propinsi Sumatera Barat.

Pengumpulan data lapangan mengenai sejarah Komandamen Sumatera di Propinsi Sumatera Barat dilakukan studi arsip di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta, studi kepustakaan, yakni Perpustakaan Daerah Sumatera Barat di Kota Padang, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Dewan Djoeang 45 Sumatera Barat di Kota Padang dan lainnya. Kemudian dilakukan studi lapangan tempat lahir dan berkembangnya Komandamen Sumatera di Propinsi Sumatera Barat.

Tahap *kedua*, kritik yaitu tahap penyeleksian sumber-sumber sejarah. Meliputi kritik eksteren dan interen. Kritik ekstern ini dilakukan untuk menguji tingkat keabsahan sumber (*otentisitas sumber*) sedangkan kritik intern dilakukan untuk menguji tingkat kepercayaan sumber (*kredibilitas sumber*). Tahapan ini, melakukan kritik terhadap pendapat yang berbeda baik melalui tulisan sejarawan ataupun sumber lisan berupa wawancara antara pencerita yang satu dengan yang lainnya. Hal ini juga melakukan studi komparatif melalui arsip-arsip tertulis, foto-foto atau lukisan masa lampau lewat benda-benda peninggalan sejarah.

Tahap *ketiga*, sistesis dari fakta yang diperoleh melalui kritik sumber atau disebut juga kredibilitas sumber itu. Dalam hal juga adanya interpretasi dalam arti merangkaikan fakta-fakta lainnya menjadi suatu kesatuan pengertian. Tahapan ini, melakukan analisa berdasarkan fakta sejarah.

Tahap *keempat*, historiografi, yaitu tahap penulisan sejarah. Pada tahap terakhir ini akan dilakukan koreksi baik secara bertahap maupun secara total. Metode koreksi bertahap dan koreksi total diterapkan guna menghindari kesalahan-kesalahan yang sifatnya substansial dan akurat sehingga menghasilkan penulisan sejarah analitis struktural yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

1. Propinsi Sumatera Barat Selayang Pandang

Ditinjau dari segi geografis, daerah yang ada di Sumatera Barat terdiri dari daerah pegunungan, perbukitan, pesisir dan pantai. Beberapa daerah berjajar di atas Bukit Barisan, dan daerah yang lainnya berjajar pula di sepanjang pantai barat Sumatera. Daerah ini juga disebut dengan *ranah Minang*. Secara tradisional, daerah-daerah dalam pengaruh Minangkabau disebut alam Minangkabau. Di dalam historiografi Minangkabau tradisional, *tambo*, dijelaskan bahwa alam Minangkabau terdiri dari dua wilayah utama. Pertama *luhak* merupakan kawasan pusat atau inti dari alam Minangkabau yang disebut juga dengan *luhak nan tigo*, yaitu *luhak* Agam, *luhak* Tanah Datar, dan *luhak* Limopuluh Kota. Kedua *rantau*, yaitu kawasan pinggiran dan sekaligus merupakan daerah perbatasan yang mengelilingi kawasan pusat.² Kendati pun penduduk Minangkabau di kawasan inti (*core region*) terus-menerus menyebar ke segala penjuru, *luhak nan tigo* tetap dianggap sebagai kampung halaman atau tempat asal mereka yang sebenarnya.

Graves (2007 : 4) menjelaskan bahwa kawasan utama dari perkembangan alam Minangkabau merupakan penghasil beras, yang masing-masing dilingkari dinding perbukitan yang memisahkan Minangkabau dengan daerah tetangganya. Kawasan ini-dalam perpustakaan Belanda sering disebut *Padangsche Bovenlanden* atau kadang-kadang juga *Minangkabausche Bovenlanden* terletak di sekitar dataran tinggi yang membentang diantara kelompok Bukit Barisan bagian tengah yang membujur dari utara-selatan Pulau Sumatera. Daerah ini berpenduduk padat, dan secara bersama-sama membentuk semacam mangkok alam yang besar, dengan lereng-lerengnya yang landai dan menawan hati menjadi dinding-dinding alami, dimana teras sawah yang berjenjang-jenjang diairi oleh curah hujan tetapi juga tersedia sumber mata air yang mengalir secara alami berkat topografinya yang cukup menguntungkan.

Kawasan ini dilingkari oleh tiga buah gunung yakni Merapi, Singgalang dan Sago), yang senantiasa mengingatkan anak nagari kepada nenek-moyang mereka yang turun dari gunung Merapi sejak dulu kala, ketika orang belum lagi mengenal sistem bercocok tanam padi dan ketika orang masih di alam liar, suatu masa yang terlalu sukar untuk diingat.³ Gunung Merapi yang masih aktif dan berbahaya itu, seolah-olah bertindak sebagai penjaga perbatasan antara *luhak* Agam dengan *luhak* Tanah Datar. Gunung Singgalang tidak aktif lagi, terletak diperbatasan

² Di dalam *Tambo*, batas-batas geografis alam Minangkabau sering diperinci dengan ungkapan-ungkapan simbolik seperti berikut :.....*dari riak nan badabue, siluluak punai mati, taratak air hitam, sikalang air bangis, sampai ke durian di takuak raja*..... Mengenai batas-batas alam Minangkabau lebih lanjut lihat Pengoeloe, 1971 : 44-49.

³ Diceritakan dalam *tambo* Minangkabau bahwa Gunung Merapi merupakan tempat pendaratan nenek moyang orang Minangkabau pertama. Dimana pada permulaannya, menurut tradisi sejarah Minangkabau, hanya ada Nur Muhammad (cahaya Muhammad) melalui mana Tuhan menciptakan alam semesta dan manusia pertama. Di dalam kesatuan trasedental dan universal ini ada alam Minangkabau, serta diantara tiga dunia yang dikenal (dua yang lain adalah Cina dan "Ruhum"). Alam Minangkabau, mulai dengan pendaratan nenek moyang pertama di Gunung Merapi, yang kemudian dikelilingi air. Sejarah Minangkabau yang demikian mulai sebelum air itu surut sebelum permukaan bumi menaik dalam luasnya, sebelum penduduknya berlipat ganda. Selama air itu surut, penempatan baru dibentuk, dan akhirnya "daerah tiga *luhak*" yang akan menjadi pusat Minangkabau, ditempati (Abullah, 1988 : 4)

sebelah selatan *luhak* Agam. Serta Gung Sago, yang sekarang tidak lagi aktif terletak di kawasan *luhak* Lima Puluh Kota.

Tempat tinggal utama orang Minangkabau adalah Propinsi Sumatera Barat, yang mencakup lebih kurang 49.800 kilometer persegi yang merentang dari utara ke selatan dan diapit oleh Samundra Hindia. Daerah pedalaman (*darek*) sebagian besar terdiri dari dataran tinggi yang berbukit-bukit dengan beberapa hamparan tanah yang agak datar, sedangkan daerah pesisir (*rantau*) merupakan dataran rendah yang diselang-selingi oleh rawa-rawa. Tanah di Sumatera Barat umumnya subur dan tumbuh-tumbuhan beraneka ragam. Padi sawah adalah tanaman utama pertanian. Karet, kelapa, kopi, gambir, kayu manis dan cengkeh merupakan beberapa tanaman perdagangan yang penting. Selain kegiatan bertani, kerajinan tangan misalnya menenun dikerjakan secara meluas di beberapa tempat khususnya di sekitar Bukittinggi (Kato, 2005 : 2).

Dalam lingkungan alam yang demikian itulah kawasan pusat dari alam Minangkabau ditemui dan secara lambat laun penduduknya menyebar ke wilayah pinggiran yang kemudian disebut *rantau*. *Rantau*, karenanya adalah wilayah kedua dari alam Minangkabau. Dalam perkembangan sejarahnya merupakan daerah kolonisasi orang Minangkabau yang pergi “merantau” ke sana. *Rantau* juga merupakan permukiman di daerah pinggiran yang didirikan oleh orang dari *luhak* dan kadang kala oleh orang-orang dari luar alam Minangkabau. *Rantau* merupakan daerah yang berbatasan dengan dunia luar dan melaluinya ide-ide dan kebiasaan-kebiasaan baru diperkenalkan kepada alam (Abdullah, 1972a : 187 dalam Kato, 2005 : 21).

Di sini jelaslah, bahwa alam Minangkabau tidak hanya dipahami sebagai konsep “geografis” dimana daerah kebudayaan Minangkabau menyebar, tetapi juga mengandung pengertian sosiologis, yang dapat menjelaskan ruang-lingkup dimana wujud interaksi antara kedua kawasan (*luhak* dan *rantau*) alam Minangkabau tumbuh dan berkembang dalam proses sejarahnya. Hubungan antara pusat, *luhak* dan kawasan pinggiran, *rantau* dapat dilihat dalam dua bentuk interaksi. Yang pertama dalam bentuk ikatan politis, dan yang kedua dalam bentuk hubungan perdagangan (Zed, 1983 : 25). Ini akhirnya mempengaruhi secara geografis nagari-nagari-sebagai unit terkecil- yang ada di daerah Minangkabau, termasuk gaya hidup masyarakatnya.

Persoalan ini kemudian dijelaskan secara gamblang oleh Graves (2007 : 10), di mana menurut dia secara geografis dan sejauh berhubungan dengan gaya hidup penduduknya, orang dapat membedakan nagari-nagari di Minangkabau ke dalam tiga kategori yang masing-masingnya berbeda-beda tipe. Di daratan tinggi pedalaman (atau sering juga disebut Padang Darat), yang menjadi titik focus sejarah dan kebudayaan Minangkabau yang utama, telah berkembang dua tipe gaya-hidup penduduknya : yang *pertama* berdasarkan pertanian sawah dengan hasil panen padinya yang berlimpah ruah, sedangkan yang *kedua* adalah tipe nagari-nagari “*marginal*” yang berada di sekitar lereng perbukitan dan pegunungan, tempat ciri khas kehidupan penduduknya berusaha di luar bidang pertanian ; di sini terutama menonjol sikap “*entrepreneurship*” (kepengusahaanya), kerajinan tangan dan beberapa jenis pekerjaan keterampilan lainnya.

Sumatera Barat yang merupakan suatu wilayah yang mempunyai ciri budaya tertentu dengan mayoritas penduduknya orang Minangkabau. Di dukung oleh potensi daya alam dan letaknya yang strategis, daerah ini sejak abad ke XVI sudah menjadi daerah yang penting sebagai jalur perdagangan disekitar pantai barat Sumatera. Akibatnya daerah ini banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari daerah lain, termasuk pedagang asing yang ingin mendapatkan lada dan komoditi ekspor lainnya seperti emas dari daerah ini.

Bila dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di pulau Sumatera ini, komposisi penduduk yang mendiami wilayah Sumatera Barat tergolong besar. Dari data tahun 1930 tercatat bahwa, penduduk Sumatera Barat berjumlah 1.919.000 jiwa orang. Ini nampaknya bertambah sebesar 341.000 Jiwa orang dari tahun 1920 yakni berjumlah 1.578.000 jiwa orang. Pertambahan jumlah penduduk Sumatera dalam sepuluh tahun sebanyak 1.940.590 jiwa. Dimana pada tahun 1920 tercatat jumlah penduduk Sumatera 6.297.980 jiwa kemudian pada tahun 1930 menjadi 8.238.570 jiwa (Volkstelling 1930 voorloopige uitkomsten 2 gedeelte Buitengewesten dalam *Pemimpin Tani*, nomor 3 tahun ke V Maart, 1931)

Perkembangan perdagangan di pantai barat Sumatera, tidak hanya merubah tatanan ekonomi tradisional Minangkabau, tetapi juga memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan penduduk Sumatera Barat. Jumlah penduduk semakin meningkat setelah Belanda berhasil menguasai Sumatera Barat, terutama setelah pemerintahan Hindia Belanda membuka perkebunan dan pertambangan secara besar-besaran.

Sebagai daerah yang kaya dengan hasil buminya, Sumatera Barat banyak dikunjungi oleh orang asing, bahkan kemudian ada diantara mereka yang tinggal menetap disana. Oleh karena itu dalam penghitungan jumlah penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1852, diperkirakan penduduk asing yang terdiri dari orang Eropa, orang Tionghoa, orang Timur Asing lainnya (India, Arab dan Orang Timur asing lainnya) sudah banyak tinggal di Sumatera Barat (Graves, 1981 : 44)

Dari perkiraan penduduk tahun 1852 terlihat bahwa, penduduk Sumatera Barat mayoritas adalah pribumi yang dikenal dengan orang Minangkabau dan suku lainnya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia (Jawa, Batak dan suku lainnya). Orang Minangkabau mulanya tinggal di pedalaman Sumatera Barat sebagai daerah asal mereka. Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan kemajuan ekonomi, mengakibatkan lama kelamaan pemukiman orang Minangkabau berkembang ke daerah Pesisir yang kemudian dikenal dengan rantaunya orang Minangkabau. Selain orang Minangkabau dan orang asing, di Sumatera Barat juga ditemukan penduduk yang memiliki status budak. Budak ini didatangkan dari Pulau Nias untuk bekerja di rumah-rumah orang Eropa, orang Tionghoa dan penghulu kaya, serta sebagai tenaga buruh pada perusahaan-perusahaan Belanda.

Ledakan ekonomi tahun 1920-an naik dengan cepat namun kemudian kembali berkurang selama tahun-tahun depresi tahun 1930. Dari perkiraan penduduk tahun 1930 terlihat bahwa 98,83 % penduduk Sumatera Barat adalah penduduk pribumi dengan mayoritas dari suku Minangkabau, diikuti dengan orang Tionghoa 0,78 %, orang Eropa 0,27 %, dan 0,12 % orang

Timur asing lainnya (Spits, *Memorie Van den aftremdende resident van Sumatra Westkust*, 1930 : 1).

Tingkat pertumbuhan tahunan yang sangat tinggi (sebesar 4.6 %) antara tahun 1940 sampai 1956 sebagian hanya dipengaruhi perluasan kota. Selama tahun tersebut, dan diikuti oleh PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia), ukuran populasi berubah-ubah dengan tajam oleh karena krisis politik yang silih berganti. Pergolakan PRRI memberikan dampak yang luar biasa terhadap merantau, suatu hal yang tidak ada tolak bandingnya dalam sejarah merantau orang Minangkabau. Impaknya langsung saat itu kenaikan jumlah orang Minangkabau di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Palembang dan Pekanbaru (Naim, 1979 : 264).

Menurut sensus penduduk tahun 2004 jumlah penduduk Sumatera Barat yakni 4. 53 juta jiwa. Kemudian tahun 2007 berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk di Sumatera Barat tahun 2007 adalah 4.697.764 jiwa dimana pendistribusian berdasarkan mata pencaharian adalah 48% untuk sektor pertanian, 21% untuk sektor perdagangan dan 14% untuk sektor jasa dari total angkatan kerja 2.510.413 jiwa. Jumlah Rumahtangga Pemelihara Ternak yang bergerak dalam usaha peternakan sapi potong di Sumatera Barat tahun 2006 adalah 177.403 kepala keluarga.

Tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Barat yakni 4.845.998 jiwa orang, terdiri dari etnis Minangkabau (88.35 %), Batak (4.42 %), Jawa (4.15 %), Mentawai (1.28 %) dan lainnya seperti Cina, India, Arab dan lainnya (1.8 %) (BPS, 2010).

Orang Minangkabau yang merupakan satu dari antara kelompok etnis utama bangsa Indonesia menempati bagian tengah pulau Sumatera sebagai kampung halamannya, yang bahagian besarnya sekarang merupakan Propinsi Sumatera Barat. Di daerah ini sebelum masuknya sistem kolonial Belanda ke Minangkabau, nagari merupakan organisasi politik dan sosial tertinggi (Naim, 1979 :17). Tiap-tiap nagari diperintah oleh sebuah Dewan Penghulu atau Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari wakil-wakil *penghulu suku*. Salah seorang diantara mereka di angkat menjadi kepala, yang disebut dengan *penghulu pucuk*. Jadi yang memegang kekuasaan tertinggi atas nagari adalah Kerapatan Adat Nagari atau penghulu. Tiap nagari diperintah oleh Kerapatan Adat Nagari masing-masing dan tidak ada kaitan struktural antara nagari yang satu dengan nagari lainnya (Graves, 1981 : 10-12). Pada masa pemerintah kolonial Belanda untuk memperlancar urusan pemerintah juga dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN). Fungsi Kerapatan Adat Nagari adalah untuk membantu pemerintah dalam hal yang berhubungan dengan adat istiadat, mengenai warisan dan mengkoordinir jalannya pemerintah di tingkat nagari. Wali nagari dipilih sekali dalam lima tahun dan dapat dipilih kembali. Pemilihan dilakukan melalui musyawarah oleh seluruh anggota masyarakat dalam sebuah nagari.

Nagari terdiri dari beberapa kampung yang berdekatan-dekatan. Nagari diperintah oleh sebuah lembaga kelapa-kepala kampung di mana seorang diantaranya diangkat sebagai kepala (yang biasanya adalah *primus inter peres*). Tidak ada terdapat kaitan struktural secara formal antara nagari dengan nagari oleh karena setiap nagari berdiri sendiri di mana nagari yang satu lepas dari nagari yang lain. Dengan demikian orang dapat menyebutnya sebagai *republic nagari*.

Sekarang ini terdapat 648 nagari di Sumatera Barat. Di bawah nagari ada *kampung*, yang disebut *penghulu kampung*, sebaliknya adalah kepala-kepala dari masing-masing suku. Biasanya ada beberapa buah suku yang termasuk ke dalam sebuah kampung, dan yang dipilih menjadi penghulu kampung biasanya ialah yang tertua antara kepala-kepala suku. Kepala-kepala suku ini disebut *penghulu suku*, dan dimuliakan dengan gelar datuk yang dipusakai.

Menurut (Graves, 2007 : 12), suku adalah merupakan basis dari organisasi sosial dan sekaligus arena tempat pertarungan kekuasaan yang fundamental terjadi. Sebagai kelompok yang memiliki garis keturunan yang sama, suku terbagi-bagi ke dalam beberapa cabang keluarga yang lebih kecil. Ini tergantung pada jumlah anggota keluarga, dan sampai tingkat tertentu juga pada kepentingan dan kebutuhan di suatu nagari, suatu keluarga *batih* mungkin saja menempati suatu rumah atau lebih yang terdapat di nagari tersebut. Kemudian menurut de Jong (dalam Naim, 1979 : 18) suku atau *matriclan* ialah unit utama dari struktur sosial Minangkabau dan seseorang tidak dapat dipandang sebagai orang Minangkabau kalau dia tidak mempunyai suku. Suku sifatnya exogamis, kecuali bila tidak dapat ditelusuri lagi hubungan keluarga antara dua buah suku yang senama tetapi terdapat di kampung halaman yang berlainan. Oleh karena orang dari suku yang sama biasanya menempati lokasi yang sama, suku bisa berarti genologis maupun teritorial, sedangkan kampung tanpa dikaitkan ke salah satu suku tertentu hanyalah mengandung arti teritorial semata-mata.

Pada awalnya di Minangkabau terdapat 4 suku induk yaitu Koto, Piliang, Bodi dan Caniago. Dalam sistem adatnya ada dua kelarasan yaitu kelarasan Bodi Caniago dan kelarasan Koto Piliang. Sistem kelarasan Bodi Caniago berada dibawah naungan pemerintah Datuk Perpatih Nan Sabatang, dan sistem kelarasan koto Piliang berada dibawah pemerintahan Datuak Ketamanggungan. Suku atau *matriclean* tersebut merupakan unit utama dari struktur sosial Minangkabau. Seseorang tidak dapat dipandang sebagai orang Minangkaau kalau tidak mempunyai suku. Tetapi suku biasanya terdiri dari *paruik*, yang dikepalai oleh *kepala paruik*. *Paruik* dapat pula dibagi ke dalam beberapa *jurai*, dan *jurai* dibagi lagi ke dalam beberapa *mande* (ibu). Ruang lingkup suku yang utama bukanlah dalam cakupan regional. Suku berperan sebagai basis dari unit-unit politik, sosial dan ekonomi. Kekayaan, kekuasaan, prestasi dan posisi sosial ditentukan oleh pemilik tanah keluarga. Harta kekayaan dan sumber-sumber lainnya dikenal dengan harta pusaka. Harta pusaka tersebut bertujuan untuk melindungi semua anggota keluarga dari kemiskinan.

Komposisi dari masing-masing unit keluarga atau suku ini, adalah berdasarkan jumlah anggota keluarga yang memiliki garis keturunan yang sama dari pihak ibu. Suku terbagi-bagi lagi ke dalam cabang-cabang keluarga, atau kaum, ketika keanggotaannya juga didasarkan pada garis keturunan dari pihak ibu, atau ibu dari ibu (nenek), dan biasanya unit yang paling kecil ialah sebuah *paruik*, yang terdiri dari semua anak-anak dari satu ibu, ditambah dari anak-anak dari saudara ibu yang perempuan (anak bibi). Sebuah *paruik* biasanya tinggal pada sebuah *rumah gadang* secara bersama-sama. Hanya kaum perempuan dan anak-anak yang jadi penghuni tetap yang sesungguhnya dari suatu *rumah gadang* tersebut, dan memang mereka ini sajalah yang dibenarkan untuk tinggal atau tidur di sana. Sedangkan yang laki-laki menetap di rumah

istrinya. Jika kaum laki-laki yang belum kawin biasanya tidur pada *surau* keluarga, yang biasanya dipergunakan sebagai tempat mengaji Al-Qur'an dan tempat berkumpul para pemuda.⁴

Ruang lingkup pengaruh suatu suku bukanlah pada cakupan regional, melainkan dalam lingkup suatu nagari, tempat suku berperan sebagai basis dari unit-unit politik sosial dan ekonomi. Kekayaan, seperti juga dengan kekuasaan, prestise dan posisi-posisi sosial ditentukan oleh kepemilikan tanah keluarga, harta dan kekayaan dan sumber-sumber pemasukan lainnya; kesemuanya itu dikenal dengan harta pusaka (Graves, 2007 :13). Tanah keluarga adalah satu-satunya jenis kekayaan yang terpenting dari keseluruhan harta pusaka tersebut, seperti rumah keluarga (*rumah gadang*), dan bangunan-bangunan lainnya. Harta pusaka dianggap sebagai harta milik bersama dari semua anggota keluarga seketurunan besar beserta cabang-cabangnya sebagai suatu unit yang disebut suku.

Untuk daerah Minangkabau, khususnya dalam hal pembukaan tanah dilakukan oleh nenek moyang dengan jalan bersama-sama dengan dasar keibuan yang kemudian menimbulkan harta pusaka (Hamka, 1968 : 34). Ditinjau dari segi harta pusaka ada dua macam (Batuah dan Majoindo, 1956 ;23). *Pertama*, harta pusaka tinggi yaitu harta yang turun menurun dari beberapa generasi artinya hutan tanah sawah, ladang turun temurun dari ninik turun kemamak dari mamak kepada kemenakan sampai keketurunan selanjutnya. *Kedua*, harta pusaka rendah yaitu harta yang turun dari satu generasi artinya harta yang diterima dari seseorang baik dari salah seorang kaum ataupun dari orang lain. Disamping kedua jenis harta pusaka diatas terdapat pula harta pencaharian. Menurut Graves (2007 : 48) memperoleh harta benda sendiri dinamakan harta pencaharian. Kekayaan tanah dan lainnya yang dikumpulkan perorangan selama hidupnya juga termasuk harta pencaharian dan juga kembali kepada keturunan ibu pada waktu meninggal.

Kebiasaan atau cara-cara untuk mengatur penguasaan tanah seperti sistem gadai-mengadai, bagi hasil diatur dalam kelembagaan penguasaan tanah. Untuk tanah pusaka tinggi, gadai hanya dapat dilakukan atas kesepakatan anggota kaum sebagai pemilik tanah pusaka tinggi yang bersangkutan. Tanah pusaka tinggi hanya dapat digadaikan atau dijual karena alasan-alasan berikut : (1) *Rumah gadang katirian* artinya rumah adat sudah rusak, perlu diperbaiki. (2) *Gadiah gadang indak balaki* artinya ada gadis yang sudah patut kawin tetapi biaya tidak ada untuk mengisi adat dan untuk pesta perkawinan itu. (3) *Mayat tabujua ditangah rumah* artinya mayat terbujur ditengah rumah dimana tanah itu boleh digadaikan untuk menutupi biaya kematian, penguburan, kenduri dan sebagainya. (4) Adat tidak berdiri artinya pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja karena biaya untuk mengisi adat pada nagari tidak cukup (Naim, 1968 : 67).

Selanjutnya mengadaikan tanah dapat juga dilaksanakan dalam hal *pertama*, untuk menutupi ketekoran dagang, *kedua* untuk biaya pengobatan dan *ketiga* untuk biaya pendidikan anak-anak. Sistem bagi hasil di Sumatera Barat dilaksanakan melalui lembaga yang dinamakan *saduo*. Pengertian *Saduo* tidak selalu berarti dibagi dua sama banyak, tetapi dibagi dua dengan

⁴ Sekarang ini menurut pengamatan Penulis pada nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat fenomena seorang laki-laki yang belum kawin tidur di surau tidak ada lagi. Mereka tidur di rumah keluarga inti mereka atau rumah orang tuanya.

tidak sama banyak diantara si pemilik dan penggarap. Perimbangan bagi hasil tergantung pada pemufakatan si pemilik dan penggarap. Perbandingan bagi hasil itu umumnya berkisar pada perdua, pertiga dan perlima. Di Sumatera Barat terbagi atas 3 (tiga) macam harta pusaka: (1) Harta pusaka tinggi (*harto pusako tinggi*) adalah harta bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada dibawah pengolalahan mamak kepala waris (laki-laki dalam kaum). (2) Harta pusaka rendah (*harto pusako randah*), yaitu harta pusaka yang diwarisi oleh anak dan berasal dari harta pencaharian orang tua. (3) Harta pencaharian (*harto pancaharian*), yaitu harta yang terdapat secara bersama-sama berlangsungnya perkawinan antara suami-istri (Amir, 2003 : 92)

Berkenaan dengan tanah ulayat yang ada di Minangkabau, dimana menurut Navis (1984), ada dua jenis jenis tanah ulayat dalam suatu nagari yakni (1) Ulayat nagari yaitu berupa hutan yang jadi cagar alam dan tanah cadangan nagari. Ulayat nagari juga disebut sebagai hutan tinggi. (2) Ulayat kaum yaitu tanah yang dapat dimanfaatkan tetapi belum diolah penduduk. Ulayat kaum disebut juga hutan rendah.

Tanah ulayat bagi masyarakat merupakan unsure pengikat bagi masyarakat untuk tinggal di suatu wilayah, dan merupakan faktor penentu asli atau tidaknya seseorang berasal dari suatu daerah. Pendayagunaan tanah ulayat adalah untuk kepentingan warga masyarakat hukum adat tersebut, dan untuk kepentingan pemeliharaan hubungan dengan masyarakat yang berasal dari luar masyarakat hukum adat tersebut (Hermayulis, 1984 : 31).

Garis keturunan yang dipakai di Minangkabau adalah garis keturunan ibu (*matrilineal*). Sedangkan agama yang dianut masyarakat adalah agama Islam, yang garis keturunannya menurut garis keturunan ayah (*patrilineal*), tetapi hal ini bukanlah yang ganjil, karena Islam dan adat Minangkabau dapat hidup berdampingan secara harmonis sehingga tercipta keluesan yang sungguh-sungguh dari keduanya (Naim (ed), 1986:7). Sistem *matrilineal* ini, ayah bukanlah anggota dari keturunan anak-anaknya, ayah diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga yang dapat memberikan keturunan. Dia dinamai *sumando* atau *urang sumando*. Tempat yang sah baginya adalah dalam keturunan ibunya. Secara tradisional sedikit-tidaknya tanggung jawabnya berada disitu. Ayah adalah wali (*mamak*) dari garis keturunannya dan pelindung atas harta garis keturunannya, sekalipun dia harus menahan diri dari hasil tanah kaum tersebut, dan dia tidak dapat menuntut bahagian tanah untuk dirinya. Tidak pula diberi tempat dirumah tersebut, karena bilik (kamar) hanya diperuntukkan bagi anggota keluarga perempuan.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Orang Minangkabau menamai negerinya alam Minangkabau. Sekalipun alam Minangkabau tersebut selama beberapa abad lamanya-setidak-tidaknya semenjak abad ke empatbelas sampai abad yang lampau merupakan kerajaan besar pengaruhnya atas sebagian besar Pulau Sumatera, di *luhak* asli (*luhak nan tigo*) sang raja hamper-hampir tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Raja pada masa itu hanyalah lambing persatuan, dan di *rantaulah* mempunyai kekuasaan, yang itupun dilimpahkan pula kepada raja-raja muda atau penghulu *rantau*. Raja berbentuk kuasa tiga-serangkai (*trium-virate*), yang disebut Rajo nan Tigo Selo, yaitu terdiri dari Rajo Alam, Rajo Adat dan Rajo Ibadat.

Ketiga-tiganya bersemayam di Pagaruyung di *luhak* Tanah Datar, sekalipun Rajo Adat dan Rajo Ibadat punya daerah dan berkedudukan masing-masing di Buo dan Sumpur Kudus.

Dari segi keadaan ekonomi masyarakat Minangkabau, yang umumnya dalam usaha disektor produksi pertanian atau agraris. Selain itu mereka juga berusaha dalam bidang perdagangan. Oleh sebab itu tanah, sawah dan ladang merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Minangkabau. Mata pencaharian masyarakat Minangkabau adalah dari hasil pertanian, namun adanya perbedaan dari kualitas tanah terutama tanah yang mendapatkan sistem irigasi. Usaha pertanian dapat dibedakan atas dua yaitu : pertanian sawah basah yang menanam padi sebagai tanaman utama dan pertanian ladang kering yang menanam tanaman palawija seperti jagung dan lain-lain. Selain itu juga mereka menanam tanaman perkebunan seperti karet, kopi, teh, kelapa sawit dan sebagainya (Dobbin, 1992 : 32-40).

Jenis tanaman tersebut diperkenalkan oleh Belanda pada awal abad ke 19. Tanaman komersil seperti karet, kopi, lada, tebu dan teh yang ditanam untuk perkebunan sendiri masih dalam taraf yang relatif kecil. Beberapa tahun kemudian Belanda memperkenalkan sistem perkebunan dalam skala besar. Akhirnya masyarakat Minangkabau ikut dalam perdagangan internasional. Para petani Sumatera Barat memilih tanaman komoditi ekspor tersebut yang lebih banyak memberikan keuntungan. Namun dari beberapa jenis tanaman yang ditanam, tanaman karet, kopi dan kelapa sawit yang ditanam beberapa tahun kemudian lebih dominan dibudidayakan di daerah tersebut. Tanaman karet misalnya, disamping ditemukan di daerah lain di Sumatera Barat seperti di Batipuh dan Muara Labuh, juga dijumpai dalam jumlah yang sangat luas di *onderafdeeling*. Lubuk Sikaping (± 37.962 *bau*). Tanaman karet ini, rata-rata diperkenalkan sekitar tahun 1911 (Oki, 1977 : 139). Khusus untuk kawasan *onderafdeeling* Lubuk Sikaping, bibit karet yang ada di daerah tersebut dibawa oleh perantau dari Malaka dan yang pulang dari menunaikan ibadah haji dari Mekah melalui Malaka dan Singapura.

Dalam perihal mata pencaharian, penduduk dikawasan ini tidaklah begitu berbeda siklus pertanian sawahnya pun agak teratur dalam musim tahunan yang sama. Tetapi penduduknya memiliki ciri-ciri watak yang relatif berbeda-beda. Penduduk Agam di utara, dengan pusatnya di Bukittinggi memiliki ciri watak yang kurang lebih pragmatis dan dinamis ; mereka mudah menyesuaikan diri dengan situasi tertentu manakala secara ekonomis menguntungkan mereka. Orang Limapuluh Kota, yang cenderung lebih mudah melakukan kontak dagang dengan kawasan pantai timur dan pusat perdagangan Selat Malaka, terletak di sekitar pusat pemerintahan di Payakumbuh. Tanah Datar, yang secara geografis dan kosmologis terletak di pumpunan tempat asal sejarah dan budaya Minangkabau serta pusat kekuasaan politik Kerajaan Pagaruyung,- juga masyarakatnya tidak terlepas dari dunia agraris (Graves, 2007 : 6).

2. Komandamen Sumatera

a. Sumatera Barat Pra Komandamen Sumatera

Sebelum abad ke-19, pemerintah Belanda tidak pernah berani menjamah pusat daerah Minangkabau yang berpenduduk padat, yang terletak di wilayah pegunungan Sumatera Barat. Selama dua abad sebelum itu, kehadiran VOC atau *de Verenigde Oost-Indische Compagnie*,

hanya diperbolehkan di beberapa kantong di daerah pesisir, dimana ia berusaha mendominasi perdagangan lada, emas dan pada akhir abad ke 18, juga perdagangan kopi. Sesudah tahun 1875, kantong-kantong ditepi pantai diambil-alih oleh Inggris dan baru sesudah Inggris menarik diri dari daerah itu, pada tahun 1819, petugas-petugas Belanda (yang pada waktu itu telah menjadi pegawai negeri karena VOC pailit) kembali ke daerah pesisir (Young dalam Booth et.al, 1988 :138).

Kehadiran Belanda di Minangkabau pada tahun 1819 tersebut, merupakan hasil dari perkembangan politik di Eropa (Mansoor dkk 1970 :127-129). Perkembangan ini merupakan matrantai peristiwa yang sangat menentukan dalam menciptakan suatu bentuk hubungan baru antara Minangkabau dengan dunia luar. Kehadiran Belanda ini beriringan dengan adanya pergolakan Padri,⁵ yang memberikan jalan masuk bagi Belanda untuk dapat menyambungkan matrantai yang terputus beberapa dasawarsa yang lalu. Kesempatan yang ada ini tidak dapat dilalui dengan mudah oleh Belanda, walaupun mereka mendapat bantuan dari kaum adat (Zed, 1983 :28-33). Pintu Masuk kepedalaman masih tetap sulit karena kekuatan Paderi masih unggul dan hampir menguasai seluruh daerah pedalaman.

Kemudian pemerintah Hindia Belanda di Minangkabau, juga mendapat halangan dengan adanya perbedaan pendapat antara pemerintah pusat (Batavia), tentang kebijakan yang harus diambil. Pemerintah Hindia Belanda yang berada di Minangkabau menghendaki adanya bantuan personil (tentara) dari Batavia untuk menambah pasukan yang akan menghadapi kaum Paderi, namun menurut pemerintah Hindia Belanda di Batavia malahan sebaliknya.

Perbedaan pendapat, serta tidak diterimanya usul pemerintah yang berada di Padang untuk menambah personil (tentara). Du Puy,⁶ sebagai Residen I pada waktu itu mengambil keputusan sendiri, dengan mengadakan perjanjian. Perjanjian ini mereka lakukan dengan Tuanku Saruaso beserta empat belas penghulu yang mewakili Minangkabau (Mansoor, 1970 :130-133; Amran, 1981 :407-409). Berdasarkan perjanjian inilah daerah Minangkabau diduduki Belanda. Jadi langkah yang diambil Belanda bukan semata-mata membantu kaum adat, akan tetapi yang diutamakan adalah untuk menanamkan kekuasaan kolonialnya.

Kekuasaan kolonial Belanda di daerah Minangkabau, akhirnya terusik tepatnya tanggal 11 Januari 1833 terjadi serangan serentak yang dilancarkan kaum Paderi diseluruh pos-pos Belanda di Minangkabau, sehingga Belanda kewalahan. Sehingga untuk meredam keadaan tersebut, maka diutuslah Komisaris Jendral Van den Bosch ke Padang, tapi bagi kaum Paderi semangatnya tidak pernah mengendor untuk melawan mereka. Dengan rasa kecewa tanggal 5 Oktober 1833, van den Bosch meninggalkan Padang.

⁵ Menurut sumber Eropah, kata Padri pertama-tama diperoleh dari laporan Rafless, penduduk Minangkabau pada waktu itu menamakan para padri itu "orang putih" atau "orang saleh". Mereka adalah tuanku-tuanku dan murid-muridnya, yang memakai pakaian berwarna putih sampai ke mata kaki dan memakai sorban putih. Berbeda dengan itu, Christine Dobbin menyatakan bahwa kata Padri berasal dari Pedir, yaitu orang-orang yang berasal dari Pedir, suatu pelabuhan di Aceh timur, tempat orang-orang Minangkabau berkumpul sebelum menuju ketanah suci untuk menunaikan ibadah haji, lihat Naim, 1988 : 25.

⁶ Sesungguhnya, bukan ide Du Puy saja yang tidak diterima oleh pemerintah Hindia Belanda (Batavia) tapi jug aide dari Residen setelah Du Puy tidak lagi memerintah di daerah Minangkabau, De Stuer sebagai Residen ke III di Minangkabau juga bernasib demikian, lihat Idrus, 1989 :27-30.

Nampaknya, pemerintah Hindia Belanda tidak kehilangan akal untuk menghadapi kaum Paderi tersebut, dengan taktik mengeluarkan “*Plakat Panjang*” pada tanggal 25 Oktober 1833 dapat mengurangi perlawanannya. *Plakat Panjang* ini merupakan politik Belanda dalam keadaan terdesak. Dapat kita lihat setelah Belanda dapat menguasai Minangkabau secara keseluruhan pada tahun 1837, satu persatu janji-janji (Amran, 1985:15-19), yang mereka ungkapkan dalam Plakat Panjang mereka langgar. Setelah Minangkabau dikuasai Belanda, mereka menerapkan sistem tanam paksa pada tahun 1847.

Pertentangan antara isi Plakat tersebut dengan praktek dilapangan dapat dilihat dalam rumusan prinsip-prinsip pemerintahan jajahan di Minangkabau- yang dikeluarkan oleh Gubernur Pantai Barat 25 Oktober 1833. *Plakat Panjang* menyebutkan bahwa :

Pemerintah akan menahan diri dari semua campur tangan terhadap urusan-urusan dalam negeri kaum pribumi, dan semua masalah yang menyangkut utang –piutang, kerugian, perkawinan, perceraian, dan pewarisan harus diputuskan oleh para tetua adat sesuai dengan adat(Beckmann, 2000 :6).

Dalam kenyataannya, pemerintah sejak awalnya telah campur tangan secara luas dalam urusan dalam negeri melalui penarikan pajak pemasaran dan lebih jauh lagi dengan cara memberlakukan sistem tanam paksa pada 1847. Sistem Tanam Paksa di Sumatera Barat telah melahirkan stagnasi ekonomi dalam masyarakat Minangkabau dan kemacetan politik pada dasawarsa terakhir abad ke-19, namun di Jawa pelaksanaan sistem ini telah mendorong kembali pertumbuhan yang mantap dibidang ekspor; Jawa makin terlihat dalam perdagangan internasional (Niel, 2003 : viii-ix).

Inilah sebabnya nanti dalam pelaksana sistem tanam paksa dan perkebunan-perkebunan besar, seperti yang telah terjadi di daerah Minangkabau, pemerintah Hindia Belanda mendapat tantangan yang cukup kuat dari masyarakat Minangkabau (Zed, 1983 :42). Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda adalah masalah kedudukan tanah di Minangkabau. Kedudukan tanah di Minangkabau tidak sama dengan kedudukan tanah di Jawa.⁷ Kendala yang dihadapi oleh pemerintah kolonial Belanda di Minangkabau adalah bahwa di Minangkabau mengadai dan menjual tidak dibenarkan oleh adat, kecuali ada syarat-syarat tertentu yang telah diatur oleh adat.⁸

⁷ Di Jawa pemerintah Hindia Belanda tidak mendapat kendala yang berat dalam menerapkan rencana mereka untuk menguasai tanah, karena dengan mempengaruhi si penguasa (raja/golongan atas) maka mereka telah dapat memanfaatkan tanah tersebut. Lagi pula di Jawa tidak ada larangan oleh adat untuk mengadai dan menjual tanah, lihat Breman, 1986 :118-125.

⁸ Untuk tanah pusaka tinggi, gadai hanya dapat dilakukan atas kesepakatan anggota kaum sebagai pemilik tanah pusaka tinggi yang bersangkutan. Tanah pusaka tinggi hanya dapat digadaikan atau dijual karena alasan-alasan berikut : (1).*Rumah gadang katirian* artinya rumah adat sudah rusak, perlu diperbaiki, (2).*Gadiah gadang indak balaki* artinya ada gadis yang sudah patut kawin tetapi biaya tidak ada untuk mengisi adat dan untuk pesta perkawinan itu, (3) *Mayat tabujua ditanha rumah* artinya mayat terbujur ditengah rumah dimana tanah itu boleh digadaikan untuk menutupi biaya kematian, penguburan, kenduri dan sebagainya, dan (3).Adat tidak berdiri artinya pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja karena biaya untuk mengisi adat pada nagari tidak cukup. Selanjutnya mengadai tanah dapat juga dilaksanakan dalam hal *pertama*, untuk menutupi ketekoran dagang, *kedua* untuk biaya pengobatan dan *ketiga* untuk biaya pendidikan anak-anak, lihat Amir, 2001 : 78.

Sebelum di perkenalkannya tanaman karet di Sumatera Barat sekitar tahun 1911, di daerah ini diperkenalkan usaha yang agak baru dalam masyarakat Sumatera Barat yakni usaha tanam paksa kopi hingga dibekukan tahun 1908.⁹ Pada masa adanya sistem tanam paksa kopi inilah munculnya *onderneming*¹⁰. *Onderneming* (perkebunan-perkebunan besar) dijumpai di hampir seluruh daerah Sumatera Barat. Dari delapan *Afdeeling* yang ada di Sumatera Barat, tidak satupun yang tidak memiliki perkebunan besar. *Afdeeling* Padang memiliki 21 persil perkebunan besar (1.724,3 bau). *Afdeeling* Batipuh dan Pariaman mempunyai 19 persil (5.316 bau). Di *Afdeeling* Tanah Datar ada tiga persil (1.252 bau), begitu juga di *Afdeeling* 50 Kota ada tiga persil (1.263 bau). *Afdeeling* Solok tercatat sebagai daerah yang paling banyak memiliki lahan perkebunan besar, yakni 37 persil (18.540 bau), *Afdeeling* Agam memiliki enam persil (7.755 bau) dan *Afdeeling* Lubuk Sikaping mempunyai 21 persil (64.668 bau). Dengan demikian untuk seluruh daerah Sumatera Barat tercatat 131.772,4 bau perkebunan besar (Asnan 1991 :26).

Sistem tanam paksa kopi yang dilembagakan tahun 1847 hingga 1908 memperlihatkan fenomena penggunaan jenis tanah adat yang bervariasi sifatnya. Pada awal pemberlakukannya, tanah pekarangan yang berada disekitar pemukiman penduduk dimanfaatkan untuk memproduksi kopi (Young dalam Booth 1988 :151-153). Kemudian pada masa ini banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah kolonial terutama dalam masalah tanah, di daerah Minangkabau yang terdiri dari nagari-nagari yang bersifat otonom dan memiliki banyak penguasa, serta tidak mengenal adanya tanah-tanah yang tidak bertuan. Hukum adat Minangkabau selama ini dipandang sebagai kendala dalam pengambil alihan tanah oleh pemerintah, karena tanah yang tidak bertuan tidak terdapat di Minangkabau. Posisi hak ulayat atas tanah relatif masih kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau waktu itu. Akibatnya upaya penyediaan tanah gerapan menjadi terkendala. Berdasarkan hal tersebutlah akhirnya memaksa pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan UU Agraria 1875 (nomor 199a) yang bersikan *domeinverklaring*, yaitu pernyataan pemerintah bahwa tanah ulayat nagari dicaplok menjadi milik negara, diatas tanah-tanah itulah perkebunan liberal dilangsungkan di Sumatera Barat (Asnan 1991 :22).

Dalam konteks inilah, pemerintah Belanda juga melakukan hukum sewenang-wenang terhadap rakyat dalam hal tanah. Menurut ketentuan adat tanah ulayat di Minangkabau dapat berbentuk : *Rimbo*, *Biluka* dan *Sasok*.¹¹ Status dari tanah ulayat ini merupakan tanah nagari dan rakyat dalam nagari bisa saja mengerjakan asal sepengetahuan dan izin dari penghulu yang

⁹ Sistem tanaman paksa kopi yang dipraktekkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Sumatera Barat sejak tahun 1847 hingga tahun 1908. Selama dua dasawarsa permulaan, sistem ini memang mendatangkan keuntungan bagi keuangan pemerintah. Setelah itu produksi kopi selalu mengalami kemerosotan, dan gejala ini berlangsung terus hingga dibekukannya sistem ini semenjak tahun 1908. Maka setelah dibekukannya sistem ini pemerintah Belanda mencoba menearahkan kepada tanaman lain termasuk tanaman karet tersebut, lihat zed 1983.

¹⁰ *Onderneming* merupakan istilah yang ada dalam literature Belanda yang juga disebut dengan perkebunan-perkebunan besar. Lihat Dobbin, 1977 :10-59 ; lihat juga Simarmata, 2002.

¹¹ *Rimbo* yaitu tanah yang tidak pernah dikerjakan atau didiami oleh manusia, dan terletak jauh dari tempat pemukiman. *Biluka* : yaitu tanah yang dulunya pernah dikerjakan dan kemudian ditinggalkan lagi hingga kembali menjadi rimba, letaknya lebih dekat dengan pemukiman penduduk. *Sasok*, yaitu berupa tanah-tanah yang tidak dikerjakan lagi, tetapi dulu pernah dikerjakan kemudian ditinggalkan, dan letaknya lebih dekat lagi dengan pemukiman penduduk, lebih jauh Amran, 1985 : 260.

mempunyai hak ulayat, sebagai wakil nagari atas tanah tersebut. Jenis tanah ini mulai diusik pemerintah Belanda sewaktu dimulainya praktek ekonomi melalui perkebunan besar milik swasta, dengan mencaplok tanah hak milik masyarakat dan dijadikannya sebagai milik negara (terkenal dengan *domeinverklaring*). Munculnya *domeinverklaring* berarti penghapusan hak ulayat di Minangkabau, sama artinya penghapusan hukum kewarisan dalam hukum adat, karena tanah ulayat melambangkan persekutuan hukum dalam masyarakat.¹²

Kemudian tahun 1922 Belanda menerapkan sistem pajak tanah, yang termasuk pajak rumah gadang. Sesungguhnya penerimaan pemerintah kolonial Belanda dari pajak tanah terus meningkat terutama di seluruh Indonesia, tahun 1829 penerimaan dari pajak tanah sebanyak f.3.305.698, tahun 1835 menjadi f.7.679.359, kemudian tahun 1840 secara mengejutkan penerimaan dari pajak tanah mencapai f.9.364.907 (Leirissa, ed.at 1977 :105).Tindakan pemungutan pajak termasuk pajak rumah gadang ini merupakan penghinaan langsung kepada tanah milik Minangkabau (Oki, 1977 :39). Kebijakan diatas yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap tanah di Minangkabau telah menimbulkan pemberontakan komunis tahun 1927. Hal tersebut diperparah lagi akibat kebijaksanaan kolonial Belanda di Minangkabau, dengan banyaknya penghulu yang diangkat oleh pemerintah maka wibawa penghulu semakin terkikis sehingga menimbulkan konflik antar masyarakat di Minangkabau, dimana hal tersebut terjadi adanya perbenturan hak ulayat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda di Indonesia terutama untuk memuluskan usaha mereka dalam bidang ekonomi (Oki, 1977 :112-117).

Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi awal tahun 1930-an diperkuat oleh situasi ekonomi. Sehubungan dengan zaman susah akibat depresi ekonomi agaknya kurang dirasakan di Sumatera Barat dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Karena secara ekonomi daerah ini mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Namun sekitar tahun 1935, nilai ekspor import perdagangan di Padang menurun 25 % dari pada tahun 1929. Terutama jatuhnya harga kopi, karet dan kopra di pasar dunia membawa pengaruh penting petani Sumatera Barat (Kahin, 2000 :56). Namun dari segi pajak penghasilan bertambah terutama pajak penghasilan produksi. Pajak penghasilan dari hasil produksi misalnya dari tahun ketahun terus meningkat. Ini terlihat pada tahun 1934 Pajak penghasilan dari hasil produksi adalah f.776.939, tahun 1935 yakni f.898.367, tahun 1936 f.852.461, 1937 yakni f.1.038.229, tahun 1938 yakni f.1.120.014, dan tahun 1939 yakni f.1.228.970 (Arsip Nasional Republik Indonesia Koleksi BB nomor 1218).

¹² Walaupun kebijakan dari pemerintah Belanda untuk memuluskan usaha dari *domeinverklaring* ini mendapat tantangan dari sejumlah ahli hukum adat terutama Van Vollenhoven. Van Vollenhoven menghendaki agar pemerintah kolonial harus mencurahkan banyak perhatian yang sungguh-sungguh untuk memahami hukum lokal dan cara pelestariannya. Hingga akhirnya tahun 1914 diumumkanlah ikhtisar hukum adat oleh suatu yayasan hukum adat yang diketuai oleh Van Vollenhoven. Pengumuman itu pada intinya menjelaskan bahwa hukum barat akan dijalankan bila masyarakat tidak keberatan, dan tambahan pula bila ketentuan sesuatu itu tidak terdapat dalam hukum adat. Selanjutnya asas *domeinverklaring* menurut van Vollenhoven harus dicabut, sehingga hak ulayat mendapat pengakuan formal kembali. Bagi tanah-tanah rakyat yang telah diambil alih oleh pemerintah dengan asas *domeinverklaring*nya, akan dikembalikan kepada masyarakat yang memilikinya, bila pemilik tersebut dapat membuktikan bahwa tanah itu sebagai hak milik mutlak. Sebaliknya bila tidak maka tanah itu akan menjadi tanah negara, dan terbukanya kesempatan untuk menggunakan secara aktif oleh perusahaan swasta, seperti munculnya hak *erpach* yaitu hak menyewa, lihat Elfianis, 1994.

Dengan penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jendral Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia kepada Angkatan Perang Jepang dibawah pimpinan Letnan Jendral H.Imamura pada tanggal 8 Maret 1942, maka sejak saat itu berakhirlah Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan dengan resmi ditegakkan kekuasaan Kemaharajaan Jepang. Berbeda dengan Hindia Belanda dimana hanya terdapat satu pemerintahan sipil, maka pada jaman Jepang terdapat tiga pemerintahan militer pendudukan yakni : (1) Tentara keenambelas dipulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Batavia, (2) Tentara keduapuluhlima di pulau Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi, dan (3) Armada selatan kedua di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat dengan pusatnya di Makasar (Kartodirjo, 1977 :5).

Dalam pendudukan tentara Jepang ini keberadaan dari perkebunan terutama perkebunan karet rakyat masih tetap eksis. Pada zaman pendudukan Jepang, jenis tanaman perkebunan terutama tanaman karet dianggap penting oleh pemerintahan pendudukan Jepang karena dapat membantu biaya perang. Ini terlihat kebijakan pemerintah pendudukan Jepang misalnya di Jawa Timur hampir semua perkebunan tersebut diteruskan bekerja. Di Sumatera untuk mengembangkan perkebunan karet tersebut pemerintah pendudukan Jepang merehabilitasi serta membongkar kebun karet seluas 672.000 hektar (Kartodirjo, 1977 :42-43). Walaupun pemerintah Jepang melakukan rehabilitasi kebun karet, namun masyarakat di Mapat Tunggul pada masa pemerintahan Jepang masih tidak terlepas dari ketergantungannya terhadap sektor perkebunan ini.

Khusus di daerah Sumatera Barat tersebut, pada awalnya pendudukan Jepang sudah mulai mengadakan pembaharuan Administrasi Pemerintahan. Selain itu yang berpengaruh sekali lagi bagi sosial ekonomi masyarakat adalah melalui produksi pertanian. Pada masa pendudukan Jepang banyak kegiatan perkebunan yang terhenti. Ini akibat dari kebijakan Jepang mengalihkan produksifitas bahan pangan untuk membantu perekonomian Jepang. Cara ini dilakukan dengan mengadakan pembatasan-pembatasan pengurangan lahan perkebunan kemudian diganti dengan tanaman pangan. Pembongkaran-pembongkaran tanah pertanian dan perkebunan di ganti dengan menanam pohon jarak yakni sejenis tanaman yang menghasilkan bahan untuk minyak pelumas.

Pembongkaran tanaman pertanian dan perkebunan diganti dengan tanaman plawija seperti jagung, kacang dan umbi-umbian, hampir seluruh pelosok tanah air yang diduduki Jepang. Tujuan Jepang melakukan propoganda ini adalah untuk kepentingan ekonomi Jepang menghadapi Perang Dunia ke II. Selain pergantian produktifitas bahan pangan dari lahan perkebunan adalah usaha untuk membuat jalan-jalan jalur perdagangan dan membuat jalan kereta api dari pedalaman menuju pantai. Untuk tenaga kerja yang cukup besar di dapat secara paksa sebagai tenaga suka rela yang dikenal dengan tenaga kerja Romusha (Syofiarni, 1997 :82).

Dalam hal pemilikan lahan pada masa pemerintah Jepang, masih terlihat pada kepemilikan lahan yang disesuaikan dengan status tanahnya. Bagi masyarakat di daerah tersebut , hutan masih tetap merupakan milik dari anggota kaum dalam suatu nagari itu sendiri. Banyak tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintahan kolonial Belanda sebelumnya di ambil oleh tentara

pendudukan Jepang, hal tersebut tidak terlepas untuk membiayai perang mereka. Semua perkebunan milik pemerintah kolonial Belanda sebelumnya diambil oleh tentara pendudukan Jepang, begitu juga dengan perusahaan milik Belanda¹³

b. Sejarah Perkembangan Komandamen Sumatera

Pada saat Jepang menyerah, sebagian besar tokoh-tokoh Sumatera masih berada di Bukittinggi, sehabis menghadiri siding *Tyuo Sangi In*. Untuk mewakili Sumatera dalam “Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia” yang telah dibentuk di Jakarta. Sedianya akan berangkat Tyuo Sangi In Gi-tjo (M. Sjafei), tetapi karena keberangkatan beliau di halangi oleh Jepang, maka diutuslah Dr. M. Amir, Mr. T.M. Hasan dan Mr. Abbas. Sekembalinya Mr. T.M. Hasan ke Sumatera, yang membawa mandat dari pemerintah pusat untuk memimpin pemerintahan di Sumatera, yang memastikan tentang proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan dapat ditangkap secara rahasia oleh pemuda yang bekerja di Kantor Berita Jepang “Domei” Bukittinggi. (Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1969 : 199-200). Di Sumat era Barat, proklamasi dibacakan oleh M.Sjafei tanggal 29 Agustus 1945. Ia menambahkan teks Proklamasi yang ditandatangani Soekarno – Hatta itu dengan kalimat lain, sesuatu yang tidak pernah dilakukan di daerah manapun di Indonesia. Tambahan itu berbunyi :

“.....Maka kami bangsa Indonesia di Soematera dengan ini mengakoei Kemerdekaan Indonesia seperti dimaksoed dalam proklamasi di atas dan menjoenjoeng keagoengan kedoe pemimpin Indonesia itoe....”

Boekittinggi, hari 29 bl.8 th.1945

Atas nama bangsa Indonesia di Soematera

Moehammad Sjafei (Mestika Zed dan Kawan-kawan, 1998 : 9).

Kahin (1995 : 268) menulis bahwa pasukan mekanis Belanda bersenjata tank yang dibantu oleh pasukan Angkatan Udara yang kuat dengan segera menyusup ke dalam wilayah Republik. Di Sumatera, pasukan-pasukan Belanda menyebar dari Medan untuk menduduki tempat-tempat kunci di dalam daerah-daerah yang kaya akan perkebunan pada Keresidenan Pantai Timur, dan berhasil menguasai daerah-daerah penghasil minyak yang berharga di sekitar Kota Palembang serta menduduki pelabuhan-pelabuhan utama di pantai Sumatera Barat.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Kahin, meskipun dalam waktu yang singkat Belanda mampu mencapai banyak tujuan akhir geografisnya, mereka tidak dapat mencapai tujuan utama mereka yang lain, yaitu menghancurkan organisasi utama pasukan bersenjata Republik. Kecuali di beberapa tempat penting, pasukan-pasukan Republik bersenjata ringan terpaksa menghindari pertempuran frontal melawan pasukan-pasukan bersenjata berat Belanda (George Mc Turnan Kahin, 1995 : 268).

¹³ Di Sumatera Barat hal ini dapat kita buktikan pada pabrik Semen Padang yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda kemudian dengan berkuasanya Jepang maka pabrik tersebut diambil oleh tentara pendudukan Jepang. Lihat lebih lanjut Zed.dkk, 2001.

Pembentukan Komandemen Sumatera bisa dirunut dari kondisi bangsa Indonesia setelah merdeka. Setelah Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) sebagai bagian dari Badan Pertolongan Korban Perang. BKR bukan badan militer dan semata-mata semacam Hansip Wanra saja saat itu. Pada tanggal 5 Oktober 1945, B.K.R ini dengan maklumat Pemerintah no.6, telah ditransformasikan menjadi T.K.R (Tentara Keamanan Rakyat). Isi maklumat untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 6 Oktober 1945 keluar maklumat tambahan yaitu, sebagai menteri keamanan rakyat diangkat Soeprijadi. (Audrey Kahin, 2006 :92-92.)

Pada awalnya Komandemen Sumatera berpusat di Prapat –Sumatera Utara. Markas Komandemen Sumatera ditempatkan di sebuah villa besar, bertingkat, bekas peristirahatan Gubernur Belanda di zaman Hindia Belanda. Di daerah ini komandemen tidak dapat berfungsi penuh. Tempatnya terlalu terisolasi dan markas ini tidak mempunyai perangkat perhubungan yang dapat menghubungkan markas ini dengan kesatuan-kesatuan di seluruh Sumatera. Mayor Sudarsono komandan seksi Perhubungan yang ditugaskan untuk membangun perhubungan komandemen ternyata mempunyai banyak kesulitan untuk mendapatkan alat perhubungan. Sebagian pejabat seperti Kolonel M. Nuch yang memimpin komandemen di Sumatera Selatan tidak pernah datang ke Prapat. Semua ini, membuat komandemen tidak berfungsi. Akhirnya seksi Intelijen Komandemen dipindahkan ke Pematang Siantar tepatnya di Marihat,¹⁴ khususnya bagian yang harus menghadapi tugas Sumatera Timur.(Chairul Basri, *Ibid* 2003 : 130.)

Dengan terbentuknya kantor di Marihat, yang akan memantau front Sumatera Timur, Tapanuli dan Aceh maka kantor intelijen sekarang ini mempunyai dua kantor. Kantor yang lain ada di Bukittinggi, yang memantau kejadian-kejadian di front Padang dan sekitarnya, serta seluruh Sumatera Tengah meliputi Sumatera Selatan.

Komandemen Sumatera pindah ke Bukittinggi beberapa hari sebelum agresi Belanda pertama. Pada waktu ini yang seharusnya komandemen yang membentuk kesatuan-kesatuan, tetapi sekarang terbalik. Devisi lebih dahulu lahir dari komandemen. Laskar-laskar lebih dahulu lahir dari komando-komando.

Di Sumatera Barat proses menentarkan laskar ini berjalan lancar. Sumatera Barat penduduknya homogen. Tidak ada pertentangan suku dan kerja sama antara pihak tentara dan pemuka-pemuka masyarakat semenjak semula berjalan lancar. Kerjasama antara tentara dan pemuka-pemuka agama misalnya telah menyebabkan laskar-laskar seperti Hisbullah dan Sabilillah dapat dijadikan batalyon-batalyon yang akhirnya menjadi bagian resimen Bukittinggi. Sebab itu Sumatera Barat dalam revolusi dapat memusatkan perhatiannya kepada musuh yaitu Belanda.

¹⁴ Lokasi markas di Marihat terletak di sebuah gedung bekas kantor perkebunan karet. Jarak Marihat ke Pematang Siantar kira-kira lima kilometer. Setiap hari harus kami tempuh dengan berjalan kaki, karena jarang ada kendaraan yang menghubungkan Marihat ke Pematang Siantar. Lebih lanjut lihat Chairul Basri, *Apa Yang Saya Ingat*.

Di Sumatera Timur pertentangan antara suku dengan suku sangat tajam. Mereka hanya mengenal penyelesaian masalah melalui kekerasan. Perpecahan dalam partai politik sangat mempengaruhi penyatuan laskar-laskar. Sebenarnya Komandemen Sumatera merupakan wahana yang terbaik untuk menyatukan laskar-laskar. Tetapi ini tidak dapat terwujud, dan mengakibatkan terjadinya tragedi yang menyedihkan. Semua ini membuka kesempatan bagi Belanda untuk mempercepat lahirnya negara Sumatera Timur.

Ternyata argresi Belanda pertama itu tidak berjalan lama. Pada tanggal 2 Agustus Dewan 1947 Dewan Keamanan PBB telah memutuskan agar diadakan *cease fire* dalam persengketaan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 4 Agustus 1947 Presiden Sukarno bersama dengan pihak Belanda, memerintahkan penghentian tembak-menembak dan tetap tinggal di tempat masing-masing.(Chairul Basri, 2003 : 148.)

Kemudian ketika Hatta diangkat menjadi perdana menteri pada Januari 1948, dia juga menjabat sebagai menteri pertahanan dihadapkan kepada semakin mengecilnya wilayah kekuasaan republik, terutama di Jawa. Dia membuat rencana bersama kolonel A.H. Nasution, Panglima Divisi Siliwangi dari Jawa Barat untuk merampingkan angkatan bersenjata Republik.(.Audrey Kahin, 2006 : 56.). Dengan demobilisasi besar-besaran mereka bermaksud menjadikan struktur angkatan bersenjata sangat efisien dan sejalan dengan itu mengurangi beban keuangan negara. (Audrey Kahin, 2005 : 196). Rencana tersebut tidak hanya dilakukan terhadap angkatan bersenjata yang ada di Jawa tetapi juga di Sumatera, di mana Nasution mempertimbangkan untuk membentuk empat daerah militer,-masing-masing daerah merupakan infrastruktur yang mandiri sehingga dengan demikian mampu membangun pertahanan dengan kekuatannya sendiri. Khusus masing-masing divisi yang ada di Sumatera akan diciutkan menjadi satu brigade mobil. Untuk Sumatera Barat hal itu hanya seperti jumlah pasukan Divisi Banteng, yang akan dipertahankan sebagai tentara reguler sementara sisanya akan dialihkan menjadi pasukan keamanan setempat.

Dalam perjalanannya bersama Hatta ke Bukittinggi pada bulan April 1948, Nasution menyampaikan langkah-langkah rasionalisasi itu kepada para perwira Komando Sumatera, yang semuanya menolak tegas rencana tersebut. Perwira-perwira Sumatera mengemukakan bahwa reorganisasi itu mungkin baik untuk diterapkan di Jawa, tetapi tidak cocok sama sekali untuk Sumatera, Belanda hanya menguasai sekitar seperlima wilayah pulau ini sementara Jawa setengahnya. Angkatan bersenjata di Sumatera tidak menjadi beban keuangan Republik karena kebutuhan makanan prajurit dipasok oleh rakyat setempat, dan senjata mereka diproduksi secara lokal atau dibeli dengan dana hasil perdagangan dengan Singapura dan Malaysia. Kesatuan atau brigade mobil seperti itu tidak sesuai dengan tipe perjuangan rakyat yang sedang marak di Sumatera, sementara demobilisasi besar-besaran hanya akan membawa dampak psikologis yang buruk terhadap para tentara yang telah berjuang secara sukarela melawan Belanda demi membela Republik.(Ahmad Husein dan kawan-kawan, 1991 : 705) Pertentangan terbuka oleh perwira Komando Sumatera terhadap rencana rasionalisasi itu membuat marah Hatta dan Nasution. (Audrey Kahin, 2005 : 199)

Komandemen Sumatera sekarang dibawah pimpinan kolonel Hidayat. Sebutannya Panglima Tentara Teritorium Sumatera (PTTS). Pada waktu kolonel Hidayat memimpin Komandemen Sumatera, Devisi Benteng sedang menghadapi peralihan. Kepergian Ismail Lengah-pemimpin Devisi Banteng ke Jawa waktu itu menimbulkan luka yang dalam diantara para perwira Devisi Banteng. Waktu itu Kolonel Hidayat masih memerlukan waktu untuk dapat menyesuaikan sikap dan tindakannya dengan situasi di Sumatera Barat.

Adanya jurang antara pimpinan dan yang dipimpin tidak memudahkan tugasnya. Tindakan yang pertama ialah memecah daerah Devisi Banteng atau sub-teritorial Sumatera Tengah menjadi sub-teritorium Sumatera Barat dan Sub-teritorial Riau. Devisi Banteng, setelah Kolonel Ismail Lengah dicopot sudah seperti ayam kehilangan induk. Ditambah satu pukulan psikologis yaitu terbaginya Sumatera Tengah menjadi sub-teritorial tersebut. Kejadian-kejadian ini menggoyahkan kepemimpinan Devisi Banteng, justru pada saat Republik menghadapi argesi militer Belanda II.

Pada waktu agresi militer Belanda II ini markas komandemen Sumatera di Bukittinggi pernah di bom oleh Belanda ketika para anggota Komandemen Sumatera sedang rapat. Seiring dengan kondisi ini pada tanggal 21 Desember 1947 Bukittinggi dibumihanguskan. Dengan kondisi inipun basi komandemen Sumatera di pindahkan ke Rao. Komandemen memilih Rao sebagai basis mengingat letak geografisnya dan mudah berhubungan dengan Tapanuli. Dari Rao ada jalan yang menuju ke Rokan, Pasir Pangarayan dan Bagansiapiapi langsung ke Selat Malaya dan Singapura. Selain menentukan basis perjuangan komandemen Sumatera juga dibentuk staf komandemen Sumatera. Letnan Kolonel A. Tahir ditetapkan sebagai kepala staf, Mayor Chairul Basri Staf Umum I (intelijen), Mayor Kartakesuma sebagai Staf Umum II (Operasi), Mayor Tjakradipura sebagai staf III (Personil) dan Kapten D.I Pandjaitan sebagai Staf Umum IV (Logistik). Tugas mereka selain membantu Panglima juga menyediakan logistik untuk front.

Rao merupakan benteng Komandemen Sumatera terakhir. Komandemen Sumatera berangsur-angsur mulai di demobilisasi. Perwira-perwiranya ditempatkan oleh Panglima ke berbagai daerah. Letnan Kolonel Ahmad Tahir ditarik ke Jakarta. Mayor Tjakradipura di tarik ke Jakarta. Kapten Panjaitan dan Mayor M.M.R Kartakesuma ditempatkan di Medan. Demgan demikian selesailah tugas komandemen di daerah Rao. Sebagian dari tugasnya dibebankan kepada Markas Besar Angkatan Darat Jakarta.

Kemudian menelusuri sejarah komandemen Sumatera tidak terlepas dari posisi Sumatera Barat dan sejarah PDRI yang pernah menghiasi daerah ini. Propinsi Sumatera Barat,¹⁵ dalam Perang Kemerdekaan memiliki posisi yang strategis dan unik. Kestrategian posisi daerah tersebut

¹ Diantara daerah Sumatera yang terkenal sebagai bumpunya yakni Kabupaten Sijunjung. Sejarah Kabupaten Sijunjung tidak terlepas dari perihal dimana setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pada bulan Oktober 1945 dibentuklah Kabupaten Tanah Datar dengan ibukotanya Sawahlunto, yang wilayahnya meliputi beberapa kewedanaan yaitu Batusangkar, Padang Panjang, Solok, Sawahlunto dan Sawahlunto/Sijunjung. Dalam rangka melanjutkan perjuangan kemerdekaan, Gubernur Militer Sumatera Barat membentuk kabupaten baru, yakni Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang diresmikan pada tanggal 28 Februari 1949. Sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2008, pada 10 Maret 2008 Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung diubah namanya menjadi Kabupaten Sijunjung.

antara lain terlihat dari keadaan geo-politisnya yang secara militer dikatakan sebagai daerah bumper bagi *centrale operatie basis*. Salah-satu daerah bumper ini adalah Kota Padang, Solok dan Sawahlunto yang bagi republik (pada awal revolusi) atau Belanda (setelah Agresi Militernya yang kedua) adalah pusat pengaturan strategi dan operasi militer.

Posisi Sumatera Barat dikatakan unik karena di samping sebagai daerah bumper bagi tentara republik, juga menjadi daerah pinggiran (periferi), yang suatu saat karena “keterpencilannya” dan sukar dijangkau oleh kekuatan Belanda dari pusat operasinya, menjadi demikian strategis dipilih sebagai pusat perlawanan oleh Republik Indonesia tepatnya oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) khususnya masyarakat di daerah Bukittinggi, Limapuluhkota, Sumpur Kudus, dan daerah lainnya.

Realitas historiografis dan merupakan perihal klasik dari sebuah kesalahan yang terus dianggap sebagai kebenaran baik oleh pemerintah, masyarakat umum maupun sejarawan akademik salah-satunya keberadaan Sjafruddin Prawiranegara sebagai Presiden Republik Indonesia ke-2 (dua). Soeharto selalu ditulis Presiden Republik Indonesia ke-2 setelah Soekarno. Jika sejarah dilihat sebagai sebuah proses maka selayaknya Presiden Republik Indonesia kedua itu adalah Sjafruddin Prawiranegara. Peningkaran terhadap eksistensi Sjafruddin Prawiranegara sebagai Presiden Republik Indonesia hal itu memiliki konsekuensi baik historis maupun yuridis yang sangat besar bagi PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia). Kita tidak dapat mengenyampingkan bahwa bias keterlibatan dia atas PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) lah yang menyebabkan persoalan ini menjadi seperti itu. Kita tahu bahwa PRRI itu sendiri merupakan sebuah gerakan “pengkoreksian” atas kebijakan pemerintah Soekarno pada waktu itu bukan sebuah pemberontakan seperti yang ditulis pada buku-buku sejarah terutama pada zaman Orde Baru.

Sebagai sebuah peristiwa sejarah, PDRI yang dijuluki sebagai “penyelamat Republik” merupakan sebuah kebulatan tekad anak bangsa untuk menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tengah terancam hilang dari peta politik dunia akibat Agresi Militer Belanda ke-2. Walaupun tidak menerima secara langsung telegram yang dikirimkan oleh Pemerintah Pusat, namun setelah mendengar siaran radio didudukinya Yogyakarta bersama dengan para pejabat teras Republik lainnya, Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara membentuk PDRI yang dipersiapkan di Bukittinggi tanggal 19 Desember, dan diresmikan di Desa Halaban pada tanggal 22 Desember 1948. Dengan mengambil lokasi “*somewhere in the jungle*” di daerah Sumatera Barat dengan PDRI telah membuktikan bahwa Republik Indonesia masih tetap eksis meskipun para pemimpin Indonesia seperti Soekarno-Hatta telah ditangkap Belanda di Yogyakarta. Sjafruddin Prawiranegara menjadi Ketua PDRI dan kabinetnya terdiri dari beberapa orang Menteri. Meskipun istilah yang digunakan waktu itu “Ketua” namun kedudukannya sama dengan Presiden. Sjafruddin menyerahkan mandatnya kemudian kepada Presiden Soekarno pada tanggal 13 Juli 1949 di Yogyakarta. Dengan demikian berakhirnya riwayat PDRI yang selama kurang lebih delapan bulan melanjutkan eksistensi Republik Indonesia sebagai negara bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaan dari agresor Belanda yang ingin berkuasa kembali.

Secara fakta historis dan yuridis, Sjafruddin Prawiranegara merupakan Presiden Republik Indonesia ke-2 dengan fondasi PDRI tersebut. Memori kita dan historiografi selama ini selalu menghilangkan nama Sjafruddin Prawiranegara sebagai presiden Republik Indonesia. Buku-buku sejarah selalu menulis, setelah Soekarno maka yang menjadi presiden Republik Indonesia adalah Soeharto, kemudian B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Soesilo Bambang Yudhoyono. Nama Sjafruddin Prawiranegara dan Assaat misalnya tereleminasi begitu saja. Namun Sjafruddin Prawiranegara dan Assaat dapat dikategorikan sebagai presiden dalam sejarah Republik Indonesia, jika sejarah dilihat sebagai sebuah proses.

Ada beberapa faktor penyebab hilangnya-khusus eksistensi Sjafruddin Prawiranegara sebagai “penyelamat Republik” dengan PDRI yang berklimak pada tidak diakuinya serta dicantulkannya Sjafruddin Prawiranegara sebagai presiden Republik Indonesia ke-2, yakni : *pertama*, faktor pengendalian sejarah. Sejarah selalu dikendalikan oleh penguasa yang memerintah terutama melalui buku-buku yang ditulis. Ini umumnya terjadi pada zaman Orde Baru. Orde Baru dibawah Presiden Soeharto mengontrol sangat ketat akan buku-buku sejarah. Bagi buku-buku sejarah yang dapat membahayakan stabilitas kekuasaannya dilarang terbit dan beredar yang akan didapati.

Romein, seorang sejarawan mengatakan bahwa sejarah adalah masa lampau yang tak pernah selesai, tidak selesai ditulis serta diperdebatkan. Bahkan lebih jauh lagi kadang kala “sejarah adalah milik penguasa”. Sejarah milik penguasa yang berkuasa dalam perjalanan suatu bangsa adalah hal yang wajar. Namun seringkali penguasa yang berkuasa terlampaui mengintervensi bagaimana jalannya suatu peristiwa sejarah, apalagi menyangkut masalah stabilitas negara, pencitraan seorang tokoh yang berkuasa dan lainnya.

Itulah sebabnya historiografi mengenai sosok Sjafruddin Prawiranegara pada zaman Orde Baru dilekatkan sangat lengket pada peristiwa PRRI. Namun perihal jasa beliau pada PDRI diretas sedemikian sempit bahkan tidak begitu ditonjolkan. Pencitraan terhadap beliau menjadi redup dan kelam jadinya. Ditambah dengan adanya kontaminasi para sejarawan dalam cengkraman penguasa pada waktu membuat historiografi mengenai sosoknya, hingga outputnya jadi begitu. Lebih jauh otonomi sejarawan dipertanyakan. Perihal ini menurut Asvi Warman Adam dalam Loir, dkk (ed) (1999) tidak terlepas dari “dapur” tempat sejarah itu diolah, siapa sejarawannya, dilembaga mana dia bekerja. Makin independen lembaga atau pribadi yang menulis, makin otonom hasil karyanya. Kalau dapur sejarah itu partai seperti di bekas Uni Sovyet, sejarah adalah urusan negara. Semua diawasi ketat karena sejarawan adalah “orang-orang berbahaya”.

Kedua, persoalan pembentukan pengetahuan sejarah (*historical knowledge*), tergantung pada penguasaan terhadap sejumlah sumber daya institusional yang memungkinkan rekonstruksi, produksi, dan sirkulasi pengetahuan tentang masa lalu. Sumber-sumber daya itu-sampai batas tertentu-dikendalikan oleh negara. Penulisan buku pelajaran sekolah versi-versi tertentu, pembangunan tugu peringatan dan pemberian nama-nama jalan semuanya dikendalikan atau diawasi oleh aparat negara dengan ketat. Ini dilakukan oleh Orde Baru, dengan mengedepankan Sjafruddin Prawiranegara dengan PRRI nya sebagai “pemberontak” maka hilanglah gaung dari

PDRI yang telah dilakukan oleh Sjafruddin Prawiranegara itu sendiri. Perihal ini berkaitan dengan historiografi nasional. Historiografi nasional selama ini kadang kala merupakan sebuah kegiatan yang menyederhanakan berbagai kisah masa lalu. Ia menghapus sejarah tandingan, narasi (semi) otonomi lokal, dan menonjolkan sebuah metanarasi baru dari negara bangsa. Tidaklah salah ketika PDRI yang ada dalam buku-buku sejarah lebih sedikit dari pada persoalan PRRI yang diklaim sebagai “pemberontak” tersebut. Walaupun fakta sejarah mengungkapkan bahwa PRRI hanya sebagai gerakan koreksi dari daerah kepada pemerintah pusat seperti yang dijelaskan pada bagian diatas.

Pada hakekatnya PDRI merupakan sebuah kebulatan tekad anak bangsa untuk menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tengah terancam hilang dari peta politik dunia akibat Agresi Militer Belanda ke-2. Tanggal 19 Desember 1948 Yogyakarta dan Bukittinggi diserang oleh Belanda. Secara serentak Kabinet Hatta mengeluarkan dua surat mandat tentang pembentukan pemerintah darurat untuk Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Bukittinggi dan Mr. A.A. Maramis di New Delhi. Pada saat yang sama, Mr Sjafruddin Prawiranegara mengadakan rapat darurat dengan para pemimpin di Bukittinggi dan mengumumkan secara terbatas tentang pembentukan PDRI. Walaupun tidak menerima secara langsung telegram yang dikirimkan oleh Pemerintah Pusat, namun setelah mendengar siaran radio didudukinya Yogyakarta bersama dengan para pejabat teras Republik lainnya, Menteri Kemakmuran Mr. Sjafruddin Prawiranegara membentuk PDRI yang dipersiapkan di Bukittinggi tanggal 19 Desember 1948 dan diresmikan di Desa Halaban pada tanggal 22 Desember 1948 dan kemudian ke daerah Sumpur Kudus.

Setelah Bukittinggi dikuasai oleh tentara Belanda berbagai upaya agar PDRI ini tetap eksis pun dilakukan oleh tokoh PDRI. Misalnya saja dengan secepatnya pemimpin memindahkan pusat kekuasaan dari Bukittinggi bergerak dalam tiga kelompok. Kelompok pertama yang dipimpin Mr. St. Mohamad Rasyid dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Koto Tinggi, Gunung Omeh dan kemudian mereka menetap di sana. Rombongan kedua dibawah pimpinan Sjafroeddin Prawiranegara dan Mr. T. Muhammad Hasan berangkat Halaban dekat lereng Gunung Sago dan sekarang masuk wilayah Kabupaten 50 Koto dan terus ke Bidar Alam. Kelompok ketiga dibawah pimpinan Kol Hidayat, Sulaiman Effendi dan Mr. Muhammad Nasrun. Kolonel Hidayat terus mengadakan perjalanan sampai ke Aceh. Kepala Polisi Sumatera Barat Sulaiman Effendi membuat pertahanan yang dikenal dengan *front* Palupuh. Sedangkan Mr. Muhammad Nasrun singgah dan menetap dikampung halamannya di Lubuk Sikaping.

Strategi ini diambil supaya tentara Belanda tidak dapat melumpuhkan pemerintahan Republik Indonesia. Dengan munculnya PDRI, mata dunia masih menganggap pemerintahan Indonesia ada dan syah. Pemerintah dan tentara Belanda akan mencari PDRI ini agar tujuan dan maksud untuk menjajahan serta menguasainya. Pergerakan mereka dengan cara mobilisasi dan bergerilya. Ini dilakukan dalam rangka mempertahankan kedaulatan Indonesia dari tangan tentara Belanda. Pergerakan berlangsung mulai dari tanggal 19 Desember sampai Juli 1949.

Upaya Pemerintah Darurat Republik Indonesia ini tetap eksis maka dengan secepatnya pemimpin memindahkan pusat kekuasaan dari Bukittinggi bergerak dalam tiga kelompok.

Kelompok pertama yang dipimpin Mr. St. Mohamad Rasyid dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Koto Tinggi, Gunung Omeh dan kemudian mereka menetap di sana. Rombongan kedua dibawah pimpinan Sjafroeddin Prawiranegara dan Mr. T. Muhammad Hasan berangkat Halaban dekat lereng Gunung Sago dan sekarang masuk wilayah Kabupaten 50 Kota dan terus ke Bidar Alam. Kelompok ketiga dibawah pimpinan Kol Hidayat, Sulaiman Effendi dan Mr. Muhammad Nasrun. Kolonel Hidayat terus mengadakan perjalanan sampai ke Aceh. Kepala Polisi Sumatera Barat Sulaiman Effendi membuat pertahanan yang dikenal dengan front Palupuh. Sedangkan Mr. Muhammad Nasrun singgah dan menetap dikam halamannya di Lubuk Sikaping. Pemikiran ini diambil supaya tentara Belanda tidak dapat melumpuhkan pemerintahan Republik Indonesia. Dengan munculnya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, mata dunia masih menganggap pemerintahan Indonesia ada dan syah. Pemerintah dan tentara Belanda akan mencari Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ini agar tujuan dan maksud untuk menjajahan serta menguasai tercapai.

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

Sejarah Sumatera Barat memang unik, sebelum abad ke-19, pemerintah Belanda tidak pernah berani menjajah pusat daerah Minangkabau yang berpenduduk padat, yang terletak di wilayah pegunungan Sumatera Barat. Selama dua abad sebelum itu, kehadiran VOC atau *de Verenigde Oost-Indische Compagnie*, hanya diperbolehkan di beberapa kantong di daerah pesisir, dimana ia berusaha mendominasi perdagangan lada, emas dan pada akhir abad ke 18, juga perdagangan kopi. Sesudah tahun 1875, kantong-kantong ditepi pantai diambil-alih oleh Inggris dan baru sesudah Inggris menarik diri dari daerah itu, pada tahun 1819, petugas-petugas Belanda (yang pada waktu itu telah menjadi pegawai negeri karena VOC pailit) kembali ke daerah pesisir

Keunikan sejarah Sumatera Barat tersebut, kemudian tergambar dalam perjalanan pembentukan komandemen sumatera yang mana daerah ini memiliki peran penting. Pada awalnya Komandemen Sumatera berpusat di Prapat –Sumatera Utara. Markas Komandemen Sumatera ditempatkan di sebuah villa besar, bertingkat, bekas peristirahatan Gubernur Belanda di zaman Hindia Belanda. Di daerah ini komandemen tidak dapat berfungsi penuh. Tempatnya terlalu terisolasi dan markas ini tidak mempunyai perangkat perhubungan yang dapat menghubungkan markas ini dengan kesatuan-kesatuan di seluruh Sumatera. Mayor Sudarsono komandan seksi Perhubungan yang ditugaskan untuk membangun perhubungan komandemen ternyata mempunyai banyak kesulitan untuk mendapatkan alat perhubungan. Sebagian pejabat seperti Kolonel M. Nuch yang memimpin komandemen di Sumatera Selatan tidak pernah datang ke Prapat. Semua ini, membuat komandemen tidak berfungsi. Akhirnya seksi Intelijen Komandemen dipindahkan ke Pematang Siantar tepatnya di Marihat, khususnya bagian yang harus menghadapi tugas Sumatera Timur.

Dengan terbentuknya kantor di Marihat, yang akan memantau front Sumatera Timur, Tapanuli dan Aceh maka kantor intelijen sekarang ini mempunyai dua kantor. Kantor yang lain ada di Bukittinggi, yang memantau kejadian-kejadian di front Padang dan sekitarnya, serta

seluruh Sumatera Tengah meliputi Sumatera Selatan.

Komandemen Sumatera pindah ke Bukittinggi beberapa hari sebelum agresi Belanda pertama. Pada waktu ini yang seharusnya komandemen yang membentuk kesatuan-kesatuan, tetapi sekarang terbalik. Devisi lebih dahulu lahir dari komandemen. Laskar-laskar lebih dahulu lahir dari komando-komando.

Di Sumatera Barat proses menentarkan laskar ini berjalan lancar. Sumatera Barat penduduknya homogen. Tidak ada pertentangan suku dan kerja sama antara pihak tentara dan pemuka-pemuka masyarakat semenjak semula berjalan lancar. Kerjasama antara tentara dan pemuka-pemuka agama misalnya telah menyebabkan laskar-laskar seperti Hisbullah dan Sabilillah dapat dijadikan batalyon-batalyon yang akhirnya menjadi bagian resimen Bukittinggi. Sebab itu Sumatera Barat dalam revolusi dapat memusatkan perhatiannya kepada musuh yaitu Belanda.

b.Saran

Berdasarkan perihal diatas, maka perlu kiranya sejarah Komandemen Sumatera tetap dilestarikan serta perlu disosialisasikan kepada generasi muda. Salah satunya adalah memasukkan perihal sejarah Komandemen Sumatera Barat kedalam kurikulum di sekolah sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, *School and Politics : The kaum muda movement in West Sumatera* (1927-1933). Monograph Series, Modern Indonesia Project. Ithaca, New York : Cornell University, 1972.
-”Modernization in the Minangkabau World : West Sumatra in the Early Decades of the 20th Century”. Dalam Claire Holt (ed.), *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca, NY : Cornell University Press, 1972.
-*Studi Tentang Minangkabau*. Kertas Kerja Seminar Internasional mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau 4-6 September 1980 di Bukittinggi, 1980.
-*Di Antara Harapan Masa Depan dan Harga Diri : Minangkabau Seratus Tahun Yang Lalu*. Makalah disampaikan pada Seminar Seabad Kebangkitan Nasional : Perlawanan Anti Balasting dan Gerakan Kemajuan di Sumatera Barat 1908-2008. Bukittinggi, 11 November 2008.
- Aboe Naim, Sjafnir, *Tuanku Imam Bonjol : Sejarah intelektual Islam di Minangkabau 1784-1832*. Padang : Esa, 1988.
- Amran, Rusli, *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang*. Jakarta : Sinar Harapan, 1985.
-*Sumatera Barat Plakat Panjang*. Jakarta : Sinar Harapan, 1985.
- Asfahrizal, *Sejarah perkebunan kelapa sawit Ophir dari onderneming hingga perkebunan inti rakyat di Pasaman Sumatera Barat*. Skripsi . Padang : Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1996.
- Asnan, Gusti, *Fase perkebunan besar : Eksploitasi ekonomi Belanda di Sumatera Barat akhir abad*

- XIX. Padang : Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1991.
-dkk, *Sejarah Perjuangan Rakyat Kabupaten Solok : 1945-1949*. Padang : Kerjasama DHD 45 Sumatera Barat dan Penda Kabupaten Solok, 2003.
- Amura, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Minangkabau*. Jakarta : Pustaka Antara, 1979.
- Basri, Chairul, *Apa Yang Saya Ingat*. Jakarta : Sinar Harapan, 2003.
- Dobbin, Christine. *Islamic revivalism in a changing peasant economy : Central Sumatra, 1784-1847* (Monograph Series, Scandinavian Institute of Asian Studies, no 47), 1992.
- Jeffrey Hadler, *Places Like Home: Islam, Matriliney and the History of Family in Minangkabau* thesis, Cornell University Press, 2000
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1985.
- Husein, Ahmad dan kawan-kawan, *Sejarah Perjuangan RI di Minangkabau /Riau 1945-1950*. Jakarta : BPSIM, 1991 : 705
- Kahin, Audrey *Perjuangan Kemerdekaan : Sumatera Barat dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950*. Jakarta : MSI Sumatera Barat bekerjasama dengan Ex Tentara Pelajar Sumatera Tengah, 2006
-, *Dari Pemberontakan ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1928-1998*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005 : 196.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta : Yayasan Bentang Budaya, 1999.
- Kementrian Penerangan, *Propinsi Sumatera Tengah*. Djakarta : Kementrian Penerangan RI, 1953.
- Jande A Drakard, *Kingdom of Words : Language and Power in Sumatra*. South-East Historical Monographs. Oxford University Press, 1999.
- Mansoer, M.D,dkk, *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta : Bhratara, 1970.
- Mhd Nasroen, *Dasar falsafah adat Minangkabau*. Jakarta : Bulan Bintang, 1957.
- Naim, Muchtar, *Merantau : Pola Migrasi Suku Minangkabau* : Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1984.
- Nasroen, Mhd. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta : Bulan Bintang, 1957.
- Navis, A. A. *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafitipers, 1984.
- Nazwar, Akhira, *Syekh Ahmad Khatib Ilmuwan Islam di Permulaan Abad Ini*. Jakarta: Panjimas, 1983.
- Nizar, Samsul, *Seabad Buaya Hamka Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran HAMKA tentang Pendidikan Islam*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Noer, Deliar, 1996. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta : LP3ES.
- Radjab, Mohamad. *Perang Padri di Sumatra Barat (1803-1838)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1964.
- Sairin, Sjafri, "Minangkabau yang Gelisah : Sebuah Catatan Singkat" dalam Yerri.S Putra (ed), *Minangkabau di Persimpangan Generasi*. Padang : Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2007.
- Schrieke, B.J.O. *Pergolakan Agama di Sumatra Barat, Sebuah Sumbangan Bibliografi*. Jakarta: Bhratara, 1975.
- Zed, Mestika, *Somewhere In the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia : Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan*. Jakarta : Grafiti, 1997.

Zubir, Zayardam, *Radikalisme Kaum Pinggiran : Studi Tentang Ideologi, Isu, Strategi dan Dampak Gerakan*. Yogyakarta : Insist, 2002.

Zubir, Zusneli, dan kawan-kawan, *Peran Anak Nagari pada Masa Perang : Studi Kasus Nagari Situjuh Batua Kabupaten Limapuluh Kota dalam Peristiwa PDRI dan PRRI (1948-1966)*. Padang : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2008.

Daftar Informan

Nama : Datuak Palindih Nazir

Umur : 78 Tahun

Pendidikan : SR

Pekerjaan/

Profesi : Veteran RI

Alamat : Kota Bukittinggi

Nama : Muhtazar

Umur : [80] Tahun

Pendidikan : Sarjana

Pekerjaan/

Profesi : Veteran RI

Alamat : Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.

Nama : Abdul Samad

Umur : 85 Tahun

Pendidikan : SR

Pekerjaan/

Profesi : Veteran Republik Indonesia

Alamat : Tilatang Kamang-Kabupaten Agam